

Merdeka Belajar

Episode 1-10
Kemendikbudristek

BUKU
SAKU



Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka

Merdeka Belajar

Episode 1-10
Kemendikbudristek

BUKU
SAKU



Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka

--Merdeka Belajar-- Episode 1-10 Kemedikbudristek

Copyright © 2021

Ukuran : 14 x 21 cm

ISBN : 978-623-6613-31-3

Hak cipta dilindungi Undang – Undang. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh dari isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Agustus 2021

Tim Penyusun :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rizal Maula | 7. Hanif Hidayatullah |
| 2. Eka Oktavianingsih, M.Pd. | 8. Moch Sholeh Pratama |
| 3. Rizqi Karomatul Khoiroh, S.Psi | 9. Muh Faisal Lutfi A, M.Pd |
| 4. Habi Adi Irawan S.M | 10. Surianto., S.T |
| 5. Indra Febrianto, M.Pd. | 11. Muhammad Khoiron, M.Pd |
| 6. Heni Ardianto, S.M | 12. Basra Ahmad Amru, S.Ked |

Editor : Dhianita Kusuma Pertiwi dan Rizal Maula

Penyunting : Rizal Maula

Desain Cover : Al Muiz Liddinillah

Layouter : Nova Eko

Diterbitkan oleh :





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PADA BUKU “MERDEKA BELAJAR” PEMUDA PELAJAR MERDEKA

Indonesia berdiri di atas semangat dan cita-cita kemerdekaan yang digaungkan oleh para tokoh pendiri bangsa dan diperjuangkan oleh rakyat. Salah satu dari tokoh pendiri bangsa tersebut adalah Ki Hadjar Dewantara yang telah mencetuskan konsep kemerdekaan dalam belajar dengan pendekatan humanis.

Pemikiran tersebut menginspirasi kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam merancang kebijakan transformatif yang akan secara langsung membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut pun pada gilirannya kami beri nama “Merdeka Belajar”.

Adapun paradigma dari Merdeka Belajar adalah pelibatan beragam pihak, mulai dari institusi pendidikan, guru, keluarga, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita Merdeka Belajar, yakni peningkatan pada angka partisipasi pendidikan, hasil belajar peserta didik, dan distribusi pendidikan, akan dicapai melalui perbaikan pada a) infrastruktur dan teknologi sekolah, b) kebijakan, prosedur, dan pendanaan, c) kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta d) kurikulum, pedagogi dan asesmen. Di samping itu, Merdeka Belajar juga mengintegrasikan pengarusutamaan kemajuan budaya dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari transformasi sistem pendidikan.

Implementasi Merdeka Belajar melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan sebagai agen perubahan. Hal tersebut menjadikan Merdeka Belajar bukan hanya sekadar kebijakan hitam di atas putih, tetapi sebuah kesadaran dan gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia. Buku ini adalah salah satu buah dari gerakan Merdeka Belajar yang dihasilkan melalui kerja-kerja olah gagasan dan kebersamaan para Pelajar Pancasila yang kritis dan kreatif dalam berkontribusi.

Buku ini merangkum perjalanan Merdeka Belajar dari episode pertama tentang Penggantian Ujian Nasional, Penghapusan USBN, Penyederhanaan RPP, dan Penerapan Zonasi PPDB yang kami luncurkan pada 11 Desember 2019 sampai Kampus Merdeka Vokasi, episode kesepuluh Merdeka Belajar yang kami rilis pada 25 Mei 2021. Terbitnya buku ini akan membantu masyarakat memahami lebih lanjut upaya yang sedang dilakukan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Melangkah ke depan, kami masih akan terus meluncurkan episode-episode berikutnya dari kebijakan Merdeka Belajar. Kami berharap akan muncul inisiatif-inisiatif lain, terutama dari generasi muda, untuk menggaungkan semangat Merdeka Belajar ke seluruh penjuru negeri, bahkan seantero dunia. Mari senantiasa serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar!

Jakarta, Juli 2021



Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengantar Tim Penyusun

Merdeka belajar menjadi salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Langkah ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi secara mendalam melihat situasi dan kondisi sistem pendidikan di Indonesia.

Terobosan yang dilakukan Menteri Nadiem ini banyak membawa perubahan. Hal ini diketahui setelah aksi nyata yang dilakukannya untuk melakukan perbaikan terhadap pendidikan di Indonesia mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan. Baik guru, dosen, pengelola lembaga pendidikan hingga siswa ataupun mahasiswa itu sendiri.

Atas suksesnya program merdeka belajar ini, para pemuda pelajar merdeka (Komunitas Merdeka Belajar yang didukung oleh Kemdikbudristek) yang berlatarbelakang dari Alumni penerima beasiswa Bidikmisi atau yang sekarang bernama KIP Kuliah berkolaborasi untuk menuliskan tentang fase-fase merdeka belajar yang telah dilakukan oleh Mendikbudristek. Dari kolaborasi inilah akhirnya muncul sebuah Buku Saku Merdeka Belajar Episode 1-10 Kemendikbudristek. Buku ini terdiri dari sepuluh bagian. Setiap bagian memberikan penjelasan tentang program merdeka belajar itu sendiri. Seperti pada episode pertama memberikan penjelasan tentang peluncuran empat pokok kebijakan pendidikan. Hingga pada episode 10 muncul pembahasan tentang perluasan program beasiswa LPDP.

Setiap bagian dibahas secara runtut dan detail tentang apa saja kebijakan yang telah ditetapkan hingga hal-hal teknis pun diberikan penjelasan.

Buku ini juga dilengkapi dengan bagan ataupun tabel-tabel khusus yang bermuatan informasi penting.

Dari saya selaku Ketua Tim penyusun buku ini mengucapkan terimakasih banyak kepada Mas Menteri, Tim Staf Khusus Menteri, Dirjen Diktiristek, Dirjen-dirjen lainnya dan Tim Humas Kemdikbudristek serta Forum Rektor Indonesia atas dukungannya sehingga bisa terbitnya buku ini. Semoga membawa kebaikan bagi pendidikan guna terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju di seluruh Indonesia.

Agustus 2021
Ketua Tim Penyusun
ttd
Rizal Maula

Daftar Isi

Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).....	III
Pengantar Tim Penyusun.....	IV
Daftar Isi.....	VI
MERDEKA BELAJAR EPISODE 1: PELUNCURAN EMPAT POKOK KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	1
MERDEKA BELAJAR EPISODE 2: KAMPUS MERDEKA.....	12
MERDEKA BELAJAR EPISODE 3: PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS...	26
MERDEKA BELAJAR EPISODE 4: ORGANISASI PENGGERAK.....	39
MERDEKA BELAJAR EPISODE 5: GURU PENGGERAK.....	46
MERDEKA BELAJAR EPISODE 6: TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH UNTUK PENDIDIKAN TINGGI.....	55
MERDEKA BELAJAR EPISODE 7: SEKOLAH PENGGERAK.....	64

MERDEKA BELAJAR EPISODE 8: SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN.....	75
MERDEKA BELAJAR EPISODE 9: KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MERDEKA.....	95
MERDEKA BELAJAR EPISODE 10: PERLUASAN PROGRAM BEASISWA LPDP.....	102

MERDEKA BELAJAR EPISODE 1: PELUNCURAN EMPAT POKOK KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pada seratus hari pertama masa jabatannya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim pertama telah mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa tidak hanya rencana saja yang akan dia jadikan terobosan, melainkan melakukan aksi nyata dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru maupun siswa-siswa di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dihasilkan dari diskusi intensif Mas Menteri dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan tim internal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pada episode pertama Merdeka Belajar, Kemendikbudristek meluncurkan empat kebijakan pokok Merdeka Belajar sebagai berikut.

1. USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)

Sesuai dengan esensi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa siswa akan dievaluasi oleh guru dan kelulusan siswa ditentukan oleh suatu penilaian dari sekolah. Namun, penerapan ujian akhir tingkat nasional menjadikan pelajar kurang

merdeka karena capaian belajar mereka hanya dinilai dengan soal-soal berstandar nasional atau soal pilihan ganda. Padahal, kompetensi dalam tujuan kurikulum 2013 sangatlah sulit untuk dinilai dengan tes pilihan ganda.

1 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 1, Kemendikbudristek, 2020

Sesuai dengan arah kebijakan baru tahun 2020, USBN diganti dan dikembalikan pada esensi UU Sisdiknas bahwa sekolah menyelenggarakan ujian sendiri sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum. Hal ini bukan berarti memaksa sekolah yang belum siap untuk mengubah tes kelulusannya. Menurut Mendikbudristek pada peluncuran Merdeka Belajar Episode 1, sekolah masih bisa menggunakan format USBN pada tahun sebelumnya. Sekolah-sekolah mempunyai kesempatan untuk melakukan penilaian dengan cara yang lebih holistik seperti dengan menggunakan esai, portofolio, dan penugasan-penugasan lain seperti proyek kelompok dan karya tulis. Hal ini juga tentu memberikan kemerdekaan bagi guru-guru

dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep dalam penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar, bukan hanya pengetahuan dan hafalan. Sekolah yang sudah menganggarkan untuk USBN dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. UN (Ujian Nasional)

Berdasarkan hasil diskusi dengan orangtua, siswa, dan guru, materi dalam Ujian Nasional (UN) dinilai terlalu padat dan hanya terfokus pada mengajarkan materi secara hafalan, bukan kompetensi siswa. UN yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa mengakibatkan stres siswa, guru, dan orang tua. Padahal tujuan UN yang sebenarnya adalah untuk mengevaluasi atau menilai sistem pendidikan sekolah, baik dalam lingkup regional maupun nasional.

Ujian Nasional cenderung hanya menilai satu aspek kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, dan belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Pada 2020, Ujian Nasional (UN) tetap dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pertimbangan banyaknya orangtua yang sudah berinvestasi agar anaknya mendapatkan angka terbaik di UN. Akan tetapi, untuk tahun 2021, UN diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter.

2 Ujian Nasional (UN)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru						
<p>Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran</p> <p>UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu</p> <p>UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa</p> <p>UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh</p>	<ul style="list-style-type: none">Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinyaTahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter <table border="1"><thead><tr><th>Literasi</th><th>Numerasi</th><th>Karakter</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa</td><td>Kemampuan bernalar menggunakan matematika</td><td>Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnyaMengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS	Literasi	Numerasi	Karakter	Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa	Kemampuan bernalar menggunakan matematika	Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan
Literasi	Numerasi	Karakter					
Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa	Kemampuan bernalar menggunakan matematika	Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan					

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 1, Kemendikbudristek, 2020

a. Penyederhanaan Asesmen

Tolak ukur secara nasional tetap dibutuhkan dalam pendidikan, akan tetapi perlu dipertimbangkan dan diubah apa saja yang diukur dan siapa yang diukur. Asesmen Kompetensi Minimum merupakan kompetensi yang benar-benar minimum, di mana Kemendikbudristek bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Adapun materi yang berkaitan dengan dengan kognitif hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. Menurut Buku Literasi Numerasi Kemendikbudristek bahwa Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari

dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita.

b. Survei Karakter

Selama ini, data pendidikan nasional yang tersedia adalah data kemampuan kognitif siswa. Sementara itu, kondisi dan ekosistem sekolahnya belum diketahui melalui data. Kemendikbudristek juga belum dapat mengetahui apakah asas-asas Pancasila sudah dapat dimaknai, dipahami, dan diresapi pelajar di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat dan baik, apakah kesejahteraan atau kebahagiaan anak sudah mapan, maupun apakah ada perundungan yang terjadi kepada siswa di sekolah. Survei ini akan menjadi suatu panduan bagi sekolah, Dinas Pendidikan,

maupun Kemendikbudristek. Survei ini juga akan menjadi tolak ukur dalam pemberian umpan balik kepada sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa menjadi lebih bahagia dan juga lebih kuat dalam menginternalisasi asas-asas Pancasila dalam lingkungan sekolah.

Asesmen kompetensi yang tadinya dilakukan di akhir jenjang akan diubah menjadi di tengah jenjang. Alasan pertama yaitu apabila asesmen kompetensi dilakukan di tengah jenjang maka akan memberikan waktu untuk sekolah dan guru untuk melakukan perbaikan sebelum siswa tersebut lulus. Dapat dibayangkan jika asesmen dilakukan di akhir jenjang, guru-guru serta kepala sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan kepada siswanya yang benar-benar memerlukan bantuan. Kemudian, apabila asesmen dilakukan di tengah jenjang juga akan memberikan waktu bagi semua unit pendidikan untuk melakukan perbaikan. Alasan yang kedua apabila asesmen dilakukan di tengah jenjang maka tidak bisa digunakan sebagai penentuan kelulusan bagi siswa, sehingga tidak lagi menimbulkan stres bagi orangtua ataupun siswa. Hal ini dikarenakan menggunakan penilaian formatif yang artinya asesmen ini harus berguna bagi sekolah dan guru untuk memperbaiki dirinya. Alasan yang ketiga, asesmen kompetensi dan survei karakter

bukan hanya mengikuti ide-ide sendiri, melainkan oleh berbagai macam organisasi baik dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia, seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Internasional atau disebut juga *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Bank Dunia. Bantuan tersebut bertujuan agar kualitas dari asesmen kompetensi menjadi sangat baik dan setara dengan kualitas internasional tapi juga penuh dengan kearifan lokal.

Numerasi dan literasi berbeda dengan mata pelajaran bahasa, bukan pula mata pelajaran matematika, melainkan kemampuan siswa dalam menggunakan konsep tersebut untuk menganalisa sebuah materi. Sebagai contoh ada sebuah diagram mengenai perubahan iklim mengenai permasalahan lingkungan hidup, dari situ siswa akan dapat menggunakan berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan daya analisisnya untuk menjawab pertanyaannya. Contoh kemampuan numerasi menganalisa berdasarkan *contextual intelligence*, dimana siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika ke dalam situasi tertentu baik secara abstrak maupun konkret.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awalnya terdiri dari 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban berat bagi guru-guru. Oleh karena itu, Kemendikbudristek akan mengubah menjadi format

yang jauh lebih sederhana. RPP yang baru cukup satu halaman saja, sehingga yang tadinya ada belasan komponen dirubah menjadi tiga komponen inti yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran.

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

	Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Format	Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku	Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
Komponen	RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)	<p>3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan pembelajaran ▪ Kegiatan pembelajaran ▪ Asesmen <p>1 halaman cukup</p>
Durasi Penulisan	Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri	Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 1, Kemendikbudristek, 2020

Poin penting dalam RPP sebenarnya bukan hanya masalah penulisannya, melainkan esensi RPP adalah proses refleksi dari guru tersebut. Ketika guru menulis suatu RPP, kemudian dilaksanakan di kelas esok harinya, maka kemudian dia kembali kepada RPP dan melakukan refleksi untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Maka dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan proses menulis sepuluh halaman yang tujuannya hanya sekedar pemenuhan administrasi. Kemendikbudristek juga akan memberikan berbagai contoh RPP yang singkat tetapi kualitasnya bagus untuk guru-guru.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Ada berbagai macam daerah mengalami masalah dan tidak siap dalam menerapkan kebijakan zonasi yang sangat kaku. Kebijakan sebelumnya, zonasi minimal 80%, jalur prestasi 15%, dan perpindahan 5%. Kebijakan baru bertujuan untuk menyampaikan esensi atau semangat zonasi yaitu pemerataan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, arah kebijakan baru adalah adanya sedikit kelonggaran kebijakan zonasi, yang tadinya jalur prestasi hanya 15%, saat ini diperbolehkan sampai 30%. Hal ini menjadi kesempatan baik untuk siswa yang memiliki prestasi yang baik untuk mencapai sekolah yang diinginkan. Sedangkan 70% tetap mengikuti kriteria yaitu minimum zonasi adalah 50%, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) minimal 15%, dan jalur perpindahan 5%. Hal ini merupakan hasil kompromi dan aspirasi antara untuk mencapai pemerataan pendidikan serta orangtua yang menginginkan anaknya yang berprestasi mendapatkan pilihan sekolah yang diinginkan.

4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

	 Situasi saat ini	 Arah kebijakan baru
Rancangan Peraturan	<p>Tujuan peraturan PPDB zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan akses pendidikan berkualitas• Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal <p>Pembagian zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jalur zonasi: minimal 80%• Jalur prestasi: maksimal 15%• Jalur perpindahan: maksimal 5%	<p>Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jalur zonasi: minimal 50%• Jalur afirmasi: minimal 15%• Jalur perpindahan: maksimal 5%• Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
Implementasi	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah• Belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah• Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru	<ul style="list-style-type: none">• Daerah benangan menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi• Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru

Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 1, Kemendikbudristek, 2020

Zonasi bukan tentang pemerataan pendidikan, karena ada yang memiliki dampak lebih besar lagi yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Sekolah perlu melakukan evaluasi dari jumlah atau kuantitas guru, sehingga perlu dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya mengalami kekurangan guru. Kemendikbudristek dalam hal ini perlu bantuan dari kepala dinas pendidikan setempat.

Dari Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut memang menuntut perubahan. Tidak ada perubahan yang nyaman, dan perubahan pasti ada tantangannya. Namun, sudah waktunya Indonesia melompat, bukan hanya melangkah. Saat Kemendikbudristek memberikan kemerdekaan pada guru-guru dan kepala sekolah untuk bergerak dengan adanya perubahan pada sistem asesmen yaitu Ujian Sekolah dikembalikan lagi kepada sekolah,

Ujian Nasional tidak mengukur penguasaan materi tetapi penguasaan kompetensi, RPP disederhanakan menjadi satu halaman, serta zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi. Saat guru diberi kemerdekaan, pendidikan Indonesia akan berkembang. Oleh karena itu, Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar ini sangat penting untuk diterapkan di Indonesia sehingga bisa terwujud Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Indonesia Maju.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 2: KAMPUS MERDEKA

Episode kedua Merdeka Belajar berfokus kepada pendidikan tinggi, sehingga dinamakan Kampus Merdeka. pendidikan tinggi memiliki potensi dampak terbesar untuk perwujudan SDM Unggul karena jangka waktu keluar dari pendidikan tinggi sampai di dunia nyata untuk bisa membangun Indonesia itu yang tercepat dibandingkan jenjang pendidikan lain. Secara khusus, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di jenjang S1 karena menurut data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dari 8.919.593 mahasiswa Kemendikbudristek ada 84,8% didominasi oleh peserta didik jenjang S1. Pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak cepat. Karena begitu dekat dengan dunia kerja, pendidikan tinggi harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Namun, pada saat ini situasinya tidak seperti itu. Inovasi sebagai tujuan utama pendidikan tinggi, mulai dari inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam kontribusi, inovasi dalam riset tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Menghadirkan ekosistem dengan ruang tanpa batas menjadi semangat atau esensi kebijakan Kampus Merdeka Kemendikbudristek.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2,
Kemendikbudristek, 2020

Marilah Kemendikbudristek masuk ke dalam empat pokok kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama adalah pembukaan program studi (prodi) baru. Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang lulus dengan gelar sarjana Teknik Sipil berarti telah menempuh pendidikan di prodi Teknik Sipil. Begitupun sarjana Hukum, prodinya Hukum, dan seterusnya.

Sekarang, pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan. Pertama, membuka prodi baru tantangannya sangat besar karena pendidikan tinggi ditantang untuk menjawab semua kebutuhan industri, negara, dan tuntutan-tuntutan lain. Namun, pada saat perguruan tinggi ingin berinovasi menciptakan mata kurikulum atau membentuk prodi baru, proses untuk mendapatkan izin dari kementerian sangat berat kriterianya. Situasi tersebut menjadi suatu tantangan besar bagi pendidikan tinggi. Sekarang banyak kurikulum dari

prodi-prodi di universitas Kemendikbudristek yang bersifat sangat teoritis. Dan tidak banyak yang bisa dibilang 100% *link & match* dengan kebutuhan dunia nyata. Ketiga, banyak prodi yang kurikulum dan konten materinya belum bisa bersaing di panggung dunia. Saat ini sudah banyak kurikulum yang bagus tetapi belum bisa bersaing di panggung dunia.

Jadi apa solusi Kemendikbudristek? Apa kebijakannya? Kemendikbudristek ingin melakukan kolaborasi atau bisa disebut juga “pernikahan massal” Apa yang dimaksud dengan pernikahan massal? Pernikahan massal adalah jalinan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak di luar universitas salah satunya adalah menciptakan prodi-prodi baru.

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
<p>Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru</p>	<p>PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B ▪ Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS ▪ Prodi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan¹ dan Pendidikan
<p>Proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama</p>	<p>Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan</p>
<p>Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)</p>	<p>Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C – prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT</p>
	<p>Tracer study wajib dilakukan setiap tahun</p>

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Sesuai dengan kebijakan baru terkait pembentukan prodi oleh perguruan tinggi, kampus yang mempunyai akreditasi A dan B akan mendapatkan izin membuka prodi

baru jika mereka menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu organisasi-organisasi kelas dunia. Artinya, universitas yang mempunyai akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui proses perizinan prodi di kementerian, tidak usah lagi dicocokkan dengan rumpun ilmu atau ketentuan yang mana. Persyaratan utama adalah perguruan tinggi bisa membuktikan sudah terbentuknya kerjasama dengan: 1) perusahaan kelas dunia, 2) organisasi nirlaba berkelas dunia, contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, atau United States Agency for International Development (USAID), 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 4) Top 100 World University berdasarkan QS Ranking.

Adapun untuk tiga opsi pertama, perguruan tinggi harus membuktikan kepada pemerintah bahwa kerja sama yang terjalin bersifat nyata dan riil. Bagaimana cara membuktikannya? Terdapat tiga kriteria pembuktian kerja sama. Pertama, kerja sama dalam penyusunan kurikulum. Kedua, kerja sama dalam pelaksanaan program magang. Ketiga, ada perjanjian rekrutmen bagi lulusan prodi dengan perusahaan, organisasi kelas dunia, atau BUMN/BUMD. Jika perguruan tinggi bisa membuktikan kerja samanya dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan mendapatkan izin membuka prodi baru.

Kategori:	Contoh
i Perusahaan multinasional	Perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar Fortune 500 (Contoh: Royal Dutch Shell, Nestlé, Toyota, dan lain-lain)
ii Perusahaan teknologi global	Perusahaan teknologi yang memiliki reputasi sangat baik (Contoh: Google, Apple, Amazon, Intel, Cisco Systems, dan lain-lain)
iii Startup teknologi	Perusahaan startup yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD \$50 juta (Contoh: Tokopedia, Traveloka, Gojek dan lain-lain)
iv Organisasi multilateral	Semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia (Contoh: PBB, Bank Dunia, ADB, USAID, Gates Foundation, dan lain-lain)
v BUMN dan BUMD	BUMN berskala besar di tingkat nasional (Contoh: PLN, BRI, Pertamina, dan lain-lain) BUMD berskala besar di setiap provinsi (Contoh: MRT, Bank BJB, Trans Jakarta, dan lain-lain)

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2,
Kemendikbudristek, 2020

Kenapa Kemendikbudristek mengesahkan kebijakan ini? Apa hasil yang Kemendikbudristek inginkan? Kemendikbudristek mengharapkan pernikahan massal yang dibentuk antara rektor, kepala prodi, dan dekan dengan perguruan tinggi di luar negeri, beragam organisasi dan perusahaan kelas dunia di Indonesia maupun luar negeri, untuk menciptakan kolaborasi yang riil dalam hal penyusunan kurikulum, pelaksanaan magang, dan perjanjian rekrutmen. Pemberlakuan kebijakan ini menghindarkan perizinan prodi hanya berdasarkan administrasi. Kemendikbudristek akan memberikan izin pembukaan prodi jika perguruan tinggi menjalin kerja sama aktif dengan perusahaan dan organisasi yang berkredibilitas tinggi.

Pokok kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi pendidikan tinggi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, tantangan apa saja yang dihadapi

perguruan tinggi terkait akreditasi? Saat ini, Kemendikbudristek, para dosen dan rektor mengetahui bahwa proses dan persyaratan akreditasi merupakan suatu beban yang cukup besar. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara manual. Perguruan tinggi harus berhadapan dengan tumpukan dokumentasi dan bukti. Pada dua tahun persiapan reakreditasi banyak sekali mahasiswa yang menyampaikan komplain terkait kehadiran dosen di kelas. Mereka mengalami kesulitan untuk mengajar karena tuntutan mempertahankan akreditasi.

Di sisi lain, saat ini juga banyak sekali antrian pendidikan tinggi dan prodi yang belum terakreditasi. Antrian panjang tersebut disebabkan semua prodi di semua perguruan tinggi diwajibkan memperbarui akreditasi setiap lima tahun. Tantangan semakin besar bagi perguruan tinggi kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Perguruan tinggi tersebut tidak kunjung mendapatkan proses akreditasinya, bahkan kadang sampai harus menunggu bertahun-tahun. Hampir 20% dari permintaan akreditasi tidak terpenuhi di tahun yang sama. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi yang harus mengantre bertahun-tahun..

Tantangan yang berikutnya adalah banyak sekali prodi yang ingin mencapai standar yang lebih tinggi dengan mengajukan akreditasi taraf internasional. Namun, perguruan tinggi tersebut tetap harus mengurus akreditasi nasional dengan segala macam prosesnya.

Oleh karena itu, saat ini ada tiga isu terkait akreditasi.

Pertama, sistemnya yang masih manual sehingga menjadi beban administratif yang mengganggu fokus utama dosen dan rektor yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran perguruan tinggi. Kedua, sistem penerimaan cukup diskriminatif karena banyak sekali yang benar-benar membutuhkan akreditasi tetapi tidak mendapatkannya. Ketiga, perguruan tinggi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi, yaitu akreditasi internasional, tetap harus mengulangi proses akreditasi di tingkat nasional karena belum cukup diakui arah perkembangannya.

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
<p>Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun</p>	<p>Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela</p>
<p>Proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi)</p>	<p>Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret) ▪ Jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut <p>(Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait)</p>
<p>Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi</p>	<p>Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri</p> <p>Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun</p>

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Kebijakan baru Kemendikbudristek terkait akreditasi menggunakan tiga prinsip masa depan. Pertama, akreditasi akan bersifat sukarela seperti negara-negara maju yang menerapkan sistem akreditasi sukarela. Dengan begitu, perguruan tinggi yang ingin atau membutuhkan akreditasi akan diprioritaskan, tetapi kalau tidak merasa butuh juga tidak akan mendapatkan konsekuensi apapun. Kedua, mengutamakan peran masyarakat industri dan asosiasi profesi untuk melaksanakan akreditasi, bukan lagi pemerintah. Mengingat semakin lama disiplin ilmu semakin lebih spesifik, tidak mungkin pemerintah bisa mengetahui

dan menguasai semuanya. Oleh karena itu, akreditasi prodi harusnya dikerjakan oleh asosiasi secara bergotong-royong dengan lembaga akreditasi lain..

mbaga akreditasi yang terdaftar dalam persetujuan internasional

Persetujuan internasional	Bidang	Contoh lembaga yang diakui ¹
1. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)	Umum	FIBAA, A3ES, ACQUIN, dan lain-lain ¹
2. CHEA (Council for Higher Education Accreditation)	Umum	ACEN, ATMAE, ACPE
3. USDE (United States Department of Education)	Kesehatan	ACPE, ACAOM, AOTA
4. Washington Accord	Teknik	ABET, JABEE, IABEE
5. WFME (World Federation of Medical Education)	Kesehatan	LCME, AMC, LAM-PTKes
6. Sydney Accord	Teknologi Teknik	ABET, ECUK
7. Dublin Accord	Praktisi Teknik	ABET, ECUK
8. Seoul Accord	Ilmu Komputer	ABEEK, ABET
9. Canberra Accord	Arsitektur	KAAB, NAAB
10. APQR (Asia Pacific Quality Register)	Umum	NCPA, FHEC, RR

mbaga akreditasi yang tidak terdaftar dalam persetujuan internasional

11. Lembaga akreditasi internasional yang tidak terdaftar di persetujuan internasional	Umum	HKCAAVQ, HEEACT, TEQSA
	Bisnis dan manajemen	AACSB, AMBA, EQUIS/ EFMD, IACBE, AAPBS, ACBSP
	Bidang ilmu spesifik lainnya	RSC, RCI, CAEP

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Ketiga, akreditasi harus mengikuti praktik baik standar internasional. Semakin banyak akreditasi yang diberikan juga diakui secara internasional akan semakin baik.

Kemendikbudristek akan mendorong sebanyak mungkin akreditasi perguruan tinggi tidak hanya diakui di dalam negeri karena standar yang berlaku saat ini adalah pengetahuan global. Inisiatif Kemendikbudristek sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mencetak SDM unggul di panggung dunia, bukan hanya di negara sendiri. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi atau prodi yang belum membutuhkan reakreditasi, akreditasi akan diperbarui secara otomatis. Dalam kata lain, proses reakreditasi akan dihapus secara otomatis. Pada saat yang sama, Kemendikbudristek bertransisi

ke arah praktik baik standar internasional. Kedua, sekarang reakreditasi dilakukan secara sukarela. Sebagai contoh, prodi dengan akreditasi B yang siap naik akan diprioritaskan oleh Badan Akreditasi. Terakhir, prodi-prodi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional akan dikurasi oleh Kemendikbudristek agar secara otomatis memperoleh akreditasi A dari pemerintah tanpa harus melalui proses akreditasi lagi di tingkat nasional. Pemberlakuan sistem akreditasi baru akan memungkinkan lebih banyak perguruan tinggi yang benar-benar membutuhkan akreditasi untuk lompat antrean.

Meskipun begitu, bukan berarti pemerintah tidak akan mengetatkan pengawasan. Jika pemerintah mendapatkan pengaduan dari masyarakat atau pemerintah melihat data pendaftar yang masuk menjadi menurun secara drastis atau data pengangguran dari Prodi tersebut ternyata meningkat secara drastis maka dengan data apapun pemerintah bisa melaksanakan reakreditasi. Ini sangat penting, karena pemerintah bisa melakukan secara *ad hoc* suatu Prodi diakreditasi untuk melindungi para mahasiswa dan juga para dosen di dalam Prodi tersebut untuk memastikan kualitasnya. Hal tersebut adalah kompromi dari kebijakan akreditasi baru. Perguruan tinggi yang belum membutuhkan reakreditasi otomatis akan mendapatkan perpanjangan akreditasi. Namun, pemerintah juga berhak melakukan reakreditasi kalau ada dugaan penurunan kualitas.

3 Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH	Persyaratan untuk menjadi BH dipermudah bagi PTN BLU & Satker
Mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH	PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum tanpa ada akreditasi minimum
PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BH	PTN dapat mengajukan permohonan menjadi BH kapanpun , apabila merasa sudah siap

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Kemendikbudristek maju ke topik ketiga yaitu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri sebenarnya ada tiga jenis status dari pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Status itu menentukan tingkat otonomi perguruan tinggi tersebut. Ini hanya untuk Perguruan Tinggi Negeri bukan swasta, yang paling tidak mempunyai otonomi seperti bagian dari Kementerian itu namanya pendidikan tinggi SATKER (satuan kerja), ini benar-benar seperti departemen di dalam suatu Kementerian. Format kedua adalah Badan Layanan Umum (BLU) PTN dimana lebih ada otonomi lebih ada kebebasan kemandirian tetapi tidak full seperti contohnya swasta karena itu masih berstatus bagian dari pemerintahan. Sedangkan yang paling otonomi yang paling merdeka statusnya adalah yang namanya PTN-BH (perguruan tinggi negeri badan hukum). PTN-BH berfungsi seperti swasta walaupun didanai oleh pemerintah tetapi dia

mendapatkan berbagai macam hak yang sama seperti swasta dan otonomi karena tuntutan masa ini adalah untuk semua pendidikan tinggi bisa bergerak dengan cara yang cepat. Kemendikbudristek ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin pendidikan tinggi bisa mencapai status PTN-BH agar semuanya bisa komplit di panggung dunia. Ini adalah beberapa contoh yang dapat dinikmati oleh PTN-BH yang tidak dinikmati satker dan lainnya.

PTN-BH yang ada di Indonesia baru sebanyak sebelas universitas. Sementara itu, perguruan tinggi negeri sisanya adalah BLU dan Satker. Perguruan tinggi berstatus BLU dan Satker memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan yang pertama berkaitan dengan fleksibilitas bermitra dengan industri untuk melakukan proyek bersama. Kedua, pengaturan keuangan dan pembelanjaan perguruan tinggi BLU dan Satker harus sangat detail sehingga sulit untuk melakukan perubahan secara cepat.

Kebijakan Kemendikbudristek untuk merelaksasi persyaratan pembentukan PTN-BH akan secara drastis mempermudah seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di samping itu, poin penting dari kebijakan baru Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah keleluasaan bagi perguruan tinggi yang hendak berubah menjadi PTN-BH. Oleh karena itu, tidak ada pemaksaan jika perguruan tinggi belum mendapati kebutuhan untuk menjadi PTN-BH. Adapun Kemendikbudristek telah

berkomitmen untuk tidak memberlakukan penurunan atau pengurangan subsidi bagi perguruan tinggi yang mengajukan perubahan status menjadi PTN-BH, sehingga sangat penting untuk diketahui bahwa tidak ada kerugian dari segi finansial jika perguruan tinggi berubah status menjadi PTN-BH.

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
<p>Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri</p>	<p>Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) • Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
<p>Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu</p>	<p>Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan)¹</p>
<p>Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa</p>	<p>Perubahan definisi sks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap sks diartikan sebagai "Jam kegiatan", bukan "Jam belajar". • Definisi "kegiatan": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT) • Daftar "kegiatan" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Pembahasan selanjutnya dapat dikatakan sebagai kebijakan Kampus Merdeka yang paling penting karena dampaknya untuk negara dapat dirasakan secara cepat, riil, dan masif. Yakni pemberian hak belajar tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan kampusnya. Bayangkan semua mahasiswa suatu hari harus berenang ke suatu pulau di laut terbuka sementara mereka hanya dilatih satu gaya saja di kolam renang, mereka tidak akan bertahan di lautan dengan arus deras. Itulah perumpamaan atas kondisi pendidikan tinggi Indonesia saat ini. Melalui

kebijakan Kampus Merdeka, Kemendikbudristek berupaya mengubah sistem pendidikan tinggi, khususnya di jenjang S1 untuk melatih kemampuan adaptif mahasiswa. Itulah tujuan dari pemberian hak kepada mahasiswa untuk berkegiatan tiga dari delapan semester di luar prodi dan kampus. Seperti layaknya kebijakan terkait PTN-BH, Kemendikbudristek juga menekankan bahwa program Kampus Merdeka bukanlah pemaksaan bagi mahasiswa.

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8 Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbudristek, 2020

Meskipun bersifat opsional bagi mahasiswa, perguruan tinggi wajib menyediakan opsi tersebut. Kemendikbudristek ingin menciptakan dunia baru dimana seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Perusahaan didorong untuk mengembangkan kurikulum bersama perguruan tinggi dan menjalin kerjasama rekrutmen. Berkat implementasi Kampus Merdeka, perusahaan yang

tadinya kurang tertarik mengembangkan program untuk mahasiswa secara intensif karena durasi yang singkat kini berlomba-lomba membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik untuk mengikuti program *management trainee*, dan organisasi nirlaba kelas dunia yang mengembangkan misi-misi sosial dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa melalui beragam program magang dan proyek. Tidak hanya itu, perguruan tinggi kelas dunia juga didorong untuk berpartisipasi melalui perkawinan massal antara 100 perguruan tinggi terbaik menurut QS World University Ranking top 100 dengan perguruan tinggi Indonesia untuk program pertukaran mahasiswa internasional, Indonesian International Student Mobility Program. Kemendikbudristek terus melakukan sosialisasi agar lebih banyak pimpinan perguruan tinggi Indonesia yang menjalin kerja sama dengan kampus di luar negeri mengingat animo mahasiswa yang sangat tinggi dalam mengikuti program Kampus Merdeka.

Seperti itulah upaya yang dilakukan Kemendikbudristek untuk menghilangkan batas-batas di dunia pendidikan tinggi dan mendobrak paradigma bahwa pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Sejatinya, pendidikan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong kontribusi berbagai macam elemen masyarakat untuk perbaikan pendidikan mahasiswa Indonesia. Pada gilirannya, mahasiswa akan memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan menjadi jawaban atas tantangan global.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 3: PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS

Episode ketiga Merdeka Belajar adalah “Penyaluran Dan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)”. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan kemajuan suatu bangsa pun tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan.

Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Adapun fungsi pendidikan adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Dana BOS tersebut merupakan program bantuan pemerintah dalam dunia pendidikan. Dimulai sejak tahun 2005, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hasil pengejawantahan dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 34 ayat 2 dan 3 yang mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Salah satu wujud negara dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar adalah distribusi dana BOS. Dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor guru honorer, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Dengan demikian, peranan Dana BOS sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional.

Besaran dana BOS setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa. Oleh karena itu, semakin banyak siswa maka akan semakin banyak dana BOS yang diberikan untuk sekolah tersebut. Sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sedikit akan memperoleh dana yang lebih sedikit. Selain itu, lokasi sekolah yang terletak jauh dari kota kecamatan dan kabupaten yang tentunya membutuhkan biaya yang besar untuk mengikuti kegiatan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Belum lagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak cukup, sarana dan prasarana yang sangat kurang, membuat sekolah harus kreatif dalam mengelola dana yang sedikit supaya efisien dan efektif.

Dalam hal ini, lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat vital dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum adanya sistem informasi manajemen masih sangat sederhana. Segala sesuatunya masih berjalan secara manual, masih lambat, karena semua data masih tersimpan dalam lembaran-lembaran arsip yang bermacam ragam. Penerapan sistem informasi manajemen dengan berbasis komputer pun perlu diterapkan di lembaga pendidikan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Munculnya pandemi global COVID-19 mengharuskan pemberlakuan sejumlah kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Proses belajar mengajar pun turut terdampak sehingga harus dilakukan secara daring, yang mana dalam mengajar guru tidak langsung bertatap muka dengan siswa sebagaimana biasanya dikarenakan aktivitas harus dilaksanakan di rumah guna menciptakan pembatasan sosial. Di samping itu, kebijakan di bidang pendidikan yang juga mengalami perubahan adalah kebijakan dana BOS.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A di antara Pasal 9 dan Pasal 10. Pasal tersebut mengatur ketentuan perubahan penggunaan

dana BOS Reguler sejak April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kemendikbudristek. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat lebih fleksibel. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Perubahan juga dilakukan atas dasar isu-isu atau permasalahan yang terjadi terkait dengan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS yang sebelumnya.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Pada tahun 2019, pembelanjaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer dibatasi maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta. Pembelian buku teks dan non teks dapat menggunakan dana BOS dengan batasan maksimal 20% dari jumlah dana BOS. Selain itu, alur penyaluran dana BOS yang berawal dari Kementerian Keuangan harus melalui Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD) provinsi, kemudian berlanjut ke rekening sekolah. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan yang harus ditanggung oleh sekolah-sekolah.

i Proses Penyaluran	<ul style="list-style-type: none">▪ Sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS (hingga Maret / April)▪ Banyak Kepala Sekolah terpaksa menalangi biaya operasional sekolah awal tahun▪ Keterlambatan dana BOS mengganggu proses pembelajaran siswa
ii Alokasi Penggunaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Banyak guru honorer yang mengabdikan tanpa penghasilan yang layak▪ Di tahun 2019, penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 15% (sekolah negeri) dan 30% (sekolah swasta)▪ Kepala sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer terbaik di sekolahnya▪ Banyak Kepala Sekolah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai tenaga kependidikan (operator, tata usaha, pustakawan, dst.)

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Dana BOS menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Setiap sekolah tentunya memiliki biaya operasional yang berbeda-beda, salah satunya pemberian upah untuk guru honorer. Saat ini, banyak sekali guru honorer yang telah bekerja begitu keras tetapi tidak mendapatkan penghasilan layak akibat pembiayaan yang sangat terbatas. Pengaturan penggunaan dana BOS yang terbatas menjadikan situasi tidak kondusif karena sekolah tidak memiliki dana yang cukup. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang guru atau kepala sekolahnya harus rela mengeluarkan dana pribadinya terlebih dahulu untuk menutupi biaya-biaya operasional karena permasalahan pada aturan pembelanjaan dana BOS. Selain itu, sekolah juga mengalami keterbatasan dalam merekrut pegawai.

Sebagai dampaknya, banyak sekali kepala sekolah dan guru yang harus turun tangan langsung untuk mengerjakan berbagai macam pelaporan dan tugas administratif lainnya yang seharusnya dikerjakan oleh bagian operasional.

Dalam hal ini, sejatinya, proses tercapainya pendidikan yang baik oleh suatu negara tidak lepas dari peran negara i dalam menyediakan fasilitas, baik berupa sarana maupun prasarana. Adanya lingkungan dan sarana pendidikan yang memadai adalah sumber proses pendidikan yang berkualitas. Perbaikan atau penyempurnaan dana BOS telah dilakukan Kemendikbudristek melalui pengesahan berbagai kebijakan baru untuk mempermudah penggunaan dana BOS dan pelaporan yang lebih sederhana melalui verifikasi data. Alur penyaluran dana BOS akan semakin mudah serta fleksibel demi memberikan kemerdekaan kepada sekolah-sekolah untuk berkembang. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses penerimaan Implementasi kebijakan baru diharapkan akan memudahkan penerimaan dan pemanfaatan dana BOS untuk mengurangi beban administrasi sekolah. .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Penerapan kebijakan baru tersebut juga mengatur empat pokok terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1. Dana BOS Disalurkan secara Langsung melalui Rekening Sekolah

Sejak tahun 2020, penyaluran dana BOS akan melalui mekanisme yang lebih sederhana dengan tetap memerhatikan esensi transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan tata kelola yang baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut adalah perubahan dalam mekanisme penyaluran dana BOS.

Kategori	Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020	Manfaat
Alur dana	Penyaluran dana ke sekolah dari Kemenkeu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi	Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat proses penerimaan dana BOS • Mengurangi beban administrasi sekolah
Frekuensi Penyaluran	Tahapan penyaluran sebanyak 4x per tahun	Tahapan penyaluran sebanyak 3x per tahun	
Proses verifikasi data	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi Batas akhir pengambilan data 2x per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD-P	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P	

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Terkait dengan alur pencairan dana BOS, jika pada 2019 dana BOS disalurkan oleh Kementerian Keuangan kepada sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, mulai 2020 penyaluran akan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Keuangan kepada sekolah tanpa melalui RKUD Provinsi. Sementara itu, terkait frekuensi penyaluran dana BOS, pada 2019 dilakukan empat kali pencairan dalam setahun dengan porsi tahap I sebesar 20 %, tahap II sebesar 40%, tahap

III sebesar 20%, dan tahap IV sebesar 20 %. Sekarang, penyaluran hanya dilakukan tiga kali dalam setahun dengan porsi tahap I sebesar 30%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 30%.

Selain itu, pada 2019, proses verifikasi data terkait penetapan SK sekolah penerima dana BOS oleh pemerintah daerah tingkat provinsi cukup panjang dengan berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi. Sekarang, penetapan SK dilakukan langsung oleh Kemendikbudristek melalui verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan batas akhir pengambilan data satu kali dalam setahun dengan batas waktu tanggal 31 Agustus. Pemberian batas waktu dimaksudkan untuk mencegah keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Skema baru ini tentunya akan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi sekolah, mulai dari mempercepat proses penerimaan dana BOS sampai mengurangi beban administrasi sekolah.

2. Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel untuk Sekolah

Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, penggunaan BOS kini lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut adalah perbedaan dalam mekanisme penggunaan dana BOS.

Kategori	⚠️ Situasi BOS 2019	📄 Kebijakan BOS 2020	✅ Manfaat
Pembayaran honor	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru) Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer
Alokasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% Pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia 	

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Pada 2019, diberlakukan pembatasan penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer yang jumlahnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sejak 2020, maksimal 50% dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembayaran gaji guru honorer dengan ketentuan guru tersebut telah memiliki Nomor Unit Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, jika dana masih tersedia dapat digunakan untuk pembiayaan tenaga kependidikan. Terkait dengan alokasi lainnya, sekarang tidak ada pembatasan lagi untuk penyediaan buku maupun alat multimedia. Kebijakan ini ditetapkan guna meningkatkan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah.

3. Nilai Satuan BOS yang Meningkat

Mengingat biaya operasional yang berbeda-beda

di setiap satuan sekolah, peningkatan jumlah dana BOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berikut adalah perbandingan nilai satuan BOS antara tahun 2019 dan tahun 2020.

Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020
Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun:	Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun:
• SD Rp. 800.000	• SD Rp. 900.000 ↑ Rp. 100.000 (13%)
• SMP Rp. 1.000.000	• SMP Rp. 1.100.000 ↑ Rp. 100.000 (10%)
• SMA Rp. 1.400.000	• SMA Rp. 1.500.000 ↑ Rp. 100.000 (7%)

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Besaran dana BOS mulai tahun 2020 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan meningkat sebesar 13% dari tahun sebelumnya menjadi Rp900.000. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.100.000. Sementara pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.500.000.

4. Makin Transparan dan Akuntabel

Peningkatan besaran dana BOS untuk menambah otonomi dan fleksibilitas bukan berarti mengesampingkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Keduanya bahkan semakin ditingkatkan dengan adanya kebijakan baru ini..

Kategori	⚠ Situasi BOS 2019	📄 Kebijakan BOS 2020	✅ Manfaat
Prosedur penyampaian laporan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada Tim BOS kabupaten/ kota dan atau Tim BOS provinsi Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Berdasarkan pengalaman administratif pada tahun sebelumnya, dari semua sekolah yang menerima BOS, hanya sekitar 53% di antaranya yang melaporkan penggunaan dana BOS. Hal tersebut tentu menjadi keprihatinan bersama mengingat pentingnya asas transparansi dan akuntabel dalam pelaporan. Dengan demikian, kebijakan BOS tahun 2020 mengatur sistem pelaporan penggunaan dana BOS untuk dilakukan secara daring oleh sekolah melalui situs resmi BOS Kemendikbudristek.

Pelaporan yang dilakukan secara daring merupakan syarat dalam penyaluran dana BOS tahap III. Apabila sekolah tidak melaporkan penggunaan dana secara daring, penyaluran dana BOS tahap III tidak akan dilakukan. Selain itu, sekolah juga harus melakukan publikasi atas penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat-tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang perkembangan serta keadaan sekolah atas penggunaan anggaran, dan menjadi upaya perbaikan atas kebijakan pendanaan sekolah.

Di masa yang akan datang, mekanisme dana BOS diarahkan untuk dapat dilakukan melalui platform teknologi. Pemanfaatan teknologi menjadi bentuk upaya meningkatkan transparansi pengadaan dan penggunaan dana BOS. Tak hanya itu, Kemendikbudristek juga akan melibatkan desa dalam kebijakan dana BOS di masa yang akan datang melalui program Kampus Merdeka. Perluasan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas luaran dari pendanaan dana desa sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa. Dengan begitu, Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, mahasiswa akan berkontribusi langsung membangun desa guna menguatkan jiwa kepemimpinan mereka.

Dalam mekanisme BOS tahun 2020, dana diterima sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang dan otonomi,

pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, serta mendorong partisipasi warga, sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.



MERDEKA BELAJAR EPISODE 4: ORGANISASI PENGGERAK

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Organisasi dapat diartikan kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerja sama dengan pihak terkait. Organisasi pada dasarnya dibentuk sebagai tempat ataupun wadah bagi orang-orang untuk berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis.

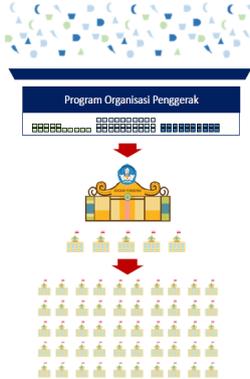
Organisasi dapat kita jumpai di mana saja, mulai dari organisasi di sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi tingkat desa seperti Karang Taruna hingga organisasi internasional antar negara-negara di dunia seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi organisasi sebagai suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama harus dapat dinikmati oleh anggota-anggotanya. Beberapa fungsi organisasi antara lain:

1. Memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi.

2. Untuk meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan.
3. Untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan setiap anggota organisasi.

Ketiga hal tersebut merupakan beberapa fungsi organisasi yang perlu kita pahami untuk mengetahui arah pergerakan suatu organisasi. Biasanya, setiap orang di organisasi memiliki tujuan pribadi masing-masing yang tentunya berbeda. Kebanyakan tujuan mengikuti sebuah organisasi adalah untuk mendapatkan penghasilan atau untuk naik pangkat. Walaupun begitu, biasanya tujuan tiap pribadi tersebut sejalan dengan tujuan organisasi, yakni meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya suatu tujuan, organisasi dapat berkembang untuk memperbesar pengaruhnya. Di antaranya berkaitan dengan perekrutan anggota, pengaruh di lingkungan luar hingga pencapaian lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut.

2 Program Organisasi Penggerak: Penyebarluasan Praktik Baik secara Berkelanjutan



Terdapat **banyak program pelatihan** guru dan kepala sekolah yang **telah dilakukan** oleh Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan secara mandiri.

Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan akan **diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Pakar Independen**. Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan **peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah** pada bidang **literasi dan numerasi serta karakter** selama **dua tahun ajaran (2020 s.d. 2022)** pada jenjang PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMP/LB.

Program Organisasi Penggerak akan menginisiasi terciptanya **Sekolah-Sekolah Penggerak** melalui pelatihan dan penguatan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah Penggerak kemudian **menyebarkan praktik baik**nya ke sejumlah PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMP/LB lain di sekitarnya.

Sekolah Penggerak yang terdampak kemudian **menyebarkan praktik baik** hasil program Organisasi Penggerak ke PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMP/LB **lainnya** di berbagai daerah di Indonesia (proses berulang).

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 4,
Kemendikbudristek, 2020

Terpenting untuk diingat adalah seluruh perubahan kebijakan dan reformasi pendidikan tidak akan mungkin bisa sukses tanpa perubahan di dalam sekolah. Kemendikbudristek meluncurkan sebuah program yaitu Program Organisasi Penggerak (POP) sebagai salah satu bagian dari Program Sekolah Penggerak. Program ini melibatkan organisasi masyarakat dan relawan pendidikan untuk berpartisipasi sebagai organisasi penggerak guna menciptakan Sekolah Penggerak.. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk mengakselerasi hasil belajar siswa. Organisasi yang berpartisipasi akan menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun 2020-2022 POP

berfokus pada peningkatan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP. Kesempatan untuk bergabung menjadi Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjadi bagian dari Program Organisasi Penggerak meliputi pengiriman proposal, seleksi, implementasi, dan integrasi.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 4, Kemendikbudristek, 2020

Program Organisasi Penggerak diharapkan membantu menginisiasi Sekolah Penggerak yang idealnya memiliki empat komponen. Pertama, kepala sekolah memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Kedua, guru berpihak kepada anak dan mengajar sesuai tahap perkembangan siswa. Ketiga, siswa menjadi senang belajar, berakhlak mulia, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Keempat, terwujudnya Komunitas Penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh,

serta organisasi kemasyarakatan yang diharapkan dapat menyokong sekolah meningkatkan kualitas belajar siswa.

Program Organisasi Penggerak melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan relawan pendidikan dengan rekam jejak baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Program ini dapat diikuti oleh organisasi yang sudah memiliki pengalaman merancang dan mengimplementasikan program bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti salah satu dari ketiga tipe program harus dapat menunjukkan rekam jejak program dalam hal peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah. Bukti dampak tersebut harus ditunjukkan secara kuantitatif.

2 Program Organisasi Penggerak: Bentuk Dukungan

Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun 2020-2022 Program Organisasi Penggerak akan meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB. Terdapat tiga tipe program dalam Program Organisasi Penggerak:

KATEGORI	REKAM JEJAK ORGANISASI PENGGERAK	SEKOLAH SASARAN	DUKUNGAN	JANGKA WAKTU IMPLEMENTASI	EVALUASI DAMPAK
 Gajah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bukti empiris dampak program terhadap hasil belajar siswa Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	> 100 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 20 miliar/tahun /program		Evaluasi dengan menggunakan Asemen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk mengukur perkembangan literasi dan numerasi, serta karakter (SD/SMP/SDLB/SMPLB) dan instrumen pengukuran kualitas pembelajaran serta pertumbuhan /perkembangan anak (PAUD/TKLB)
 Macan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	21-100 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 5 miliar/tahun /program	2 tahun (2020-2022)	
 Kijang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	5-20 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 1 miliar/tahun /program		

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 4, Kemendikbudristek, 2020

Terdapat tiga tipe program, yakni Gajah, Macan, dan Kijang yang didasarkan pada kapasitas Organisasi Penggerak.

Kategori Gajah mendapatkan dukungan dana maksimal Rp20 miliar per tahun per program dengan sasaran lebih dari 100 PAUD/SD/SMP. Persyaratan rekam jejak untuk masuk dalam kategori adalah memiliki bukti empiris dampak program terhadap hasil belajar siswa; memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru serta kepala sekolah; dan berpengalaman merancang dan implementasi program dengan baik.

Kategori Macan memperoleh dukungan dana maksimal Rp5 miliar per tahun per program dengan sasaran 21 sampai 100 PAUD/SD/SMP. Organisasi Penggerak dalam kategori ini harus menunjukkan rekam jejak bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah; dan berpengalaman merancang dan implementasi program dengan baik. Adapun kategori Kijang mendapat dukungan dana maksimal Rp1 miliar per tahun per program dengan sasaran 5 sampai 20 PAUD/SD/SMP. Untuk kategori ini, Organisasi Penggerak harus mampu menunjukkan rekam jejak telah berpengalaman merancang dan mengimplementasikan program dengan baik.

Luaran siswa dari Program Organisasi Penggerak adalah sekolah yang menghasilkan Pelajar Pancasila, yakni murid yang berakhlak mulia, independen, mandiri, punya kemampuan bernalar kritis, kreatif, bisa bekerja dalam kelompok dan bergotong royong, serta berkebinekaan

global. Selain itu, ciri-ciri Sekolah Penggerak adalah komunitas di sekeliling sekolah mendukung proses pendidikan di dalam kelas, mulai orang tua, tokoh masyarakat, sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, karakter terpenting dari Sekolah Penggerak adalah sekolah yang bisa menjadi salah satu panutan, tempat pelatihan, sekaligus inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 5: GURU PENGGERAK

Saat ini terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemendikbudristek dalam mengintervensi guru dengan berfokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogi. Namun, pelaksanaan program tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah. Selain itu, pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan penunjukan dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Belum ada asesmen yang holistik untuk mengetahui kompetensi guru.

Pelaksanaan pelatihan guru juga dilakukan dengan lokakarya-lokakarya yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung terpisah dari konteks kelas dan sekolah. Oleh karena itu, yang terjadi adalah pengembangan kompetensi guru berhenti setelah latihan selesai, menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan. Pada akhirnya, pelatihan guru dengan model *cascading* menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya.

Mengingat kondisi yang kita hadapi sekarang, program Guru Penggerak berfokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan

profesional kariernya. Menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra Guru Penggerak untuk bersama-sama melakukan *transformasi* pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan.

Program Guru Penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lain sehingga data peserta pelatihan dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang lebih objektif, tidak hanya berdasarkan pada penunjukan dan hasil UKG saja. Program pelatihan-pelatihan guru harus mengedepankan pelatihan dan *on-the-job training* untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapatkan di ruang pelatihan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar.

Selain itu, Program Guru Penggerak juga mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari. Komunitas praktik ini memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis penentuan kebijakan atau program.

Program Guru Penggerak memiliki visi dalam mewujudkan

Merdeka Belajar, dengan tercapainya profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang 1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, 2) kreatif, 3) gotong royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis; dan 6) mandiri. Guna mencapai tujuan tersebut, Kemendikbudristek akan mendorong lahirnya Guru Penggerak, yakni pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mendorong pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen *transformasi* ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Peran guru saat ini cenderung masih terbatas cenderung pada mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Tentu hal-hal tersebut masih dapat dioptimalkan lagi. Oleh karena itu, peran besar yang dimainkan oleh Guru Penggerak meliputi: mendorong tumbuh kembang murid secara holistik yang sesuai dengan profil Pelajar Pancasila, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan menjadi teladan dan agen transformasi di lingkup ekosistem pendidikan. Perlu diketahui bahwa Guru Penggerak adalah sosok yang akan selalu memprioritaskan kebutuhan murid. Dengan demikian, Guru Penggerak memiliki tanggung jawab menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan luar sekolah sehingga guru lain dapat menerapkan pembelajaran

aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid.

Harapan dan tanggung jawab besar tersebut tentu tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan dukungan dari berbagai komponen pendidikan, terutama pengawas dan kepala sekolah. Mereka adalah mitra strategis Guru Penggerak dalam mengupayakan terjadinya *transformasi* pendidikan di sekolah dan wilayahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 5,
Kemendikbudristek, 2020

Gambar di atas menjelaskan bahwa posisi Guru Penggerak berada di antara pengawas dan kepala sekolah. Guna mencapai tujuan dari program ini, diperlukan koordinasi dan timbal balik dari ketiga komponen tersebut. Misalnya kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar Calon Guru Penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya Merdeka Belajar di sekolah, dan pengawas sekolah bertugas menginisiasi program-program pengembangan kompetensi guru di wilayah.

1. Strategi Pendidikan Guru Penggerak

Pendidikan Guru Penggerak dilakukan dengan pendekatan *andragogi*. Yang dimaksud dengan *andragogi* adalah proses melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Adapun tahapan pendidikan Guru Penggerak dimulai dari rekrutmen Calon Guru Penggerak. Kemudian, Calon Guru Penggerak akan mendapatkan pendidikan selama sembilan bulan. Baru setelah itu mereka menjadi generasi baru pemimpin pendidikan yang dapat menjadi penggerak pendidikan berkualitas serta bekerjasama dengan kepala sekolah, pengawas dan instruktur pelatihan guru untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengingat alur dan tanggung jawab besar dari Guru Penggerak, tentu diperlukan strategi pendidikan Guru Penggerak yang optimal. Sistem seleksi Calon Guru Penggerak dirancang secara kolaboratif oleh praktisi pendidikan dan *human resource* dan pelaksanaannya terbuka bagi semua guru. Kurikulum pendidikan Program Guru Penggerak juga dirancang secara kolaboratif oleh guru, kepala sekolah, dosen dan praktisi pendidikan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas layanan program. Tim pendukung yang meliputi fasilitator dan pendamping Calon Guru Penggerak diseleksi dengan terbuka dan dilatih secara berkala supaya dapat memberdayakan peserta dengan

tepat. Kemudian untuk mendapatkan pembelajaran yang reflektif pendidikan Program Guru Penggerak dirancang agar guru bisa belajar, merefleksikan pengalamannya, dan menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan barunya di kelas atau sekolahnya.

2. Luaran Pendidikan Guru Penggerak

Salah satu harapan besar yang ingin diwujudkan dari hadirnya Guru Penggerak adalah menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar. Guru Penggerak adalah sosok guru yang 1) mandiri, yakni mampu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi, 2) berpihak pada murid, yakni yang bisa mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, 3) menguasai manajemen pembelajaran, yakni mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, 4) mampu berinovasi dalam upaya pengembangan sekolah melalui kolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan murid, serta 5) tidak melanggar kode etik, yakni memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.

3. Kerangka Desain Pendidikan Guru Penggerak (9 bulan)

Pendidikan untuk Guru Penggerak yang berlangsung selama sembilan bulan dilakukan secara matang dan

terukur menggunakan pendekatan andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan rincian sebagai berikut:

Kerangka Desain Pendidikan Guru Penggerak (9 bulan)

Prinsip Andragogi dan Pembelajaran berbasis pengalaman	
70%	20%
Belajar di tempat kerja dan Komunitas Praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa	Belajar dari rekan dan guru lain
	10%
	Pelatihan bersama fasilitator dan pendamping
Tujuan utama	Profil Pelajar Pancasila
Fokus Utama	<p>Pemimpin Pembelajaran</p> <p><i>Aktivitas pendidikan berupa Pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 9 bulan</i></p> <p>1 ————— 2 ————— 3 ————— 4</p> <p>Modul 1 Paradigma & Visi Guru Penggerak</p> <p>Modul 2 Praktik Pembelajaran yang Berpikir pada Murid</p> <p>Modul 3 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah</p> <p>4 Refleksi dan dampak berkelanjutan</p>
Asesmen	Hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik (rekan sejawat, pendamping, murid), dan peningkatan hasil belajar murid

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 5, Kemendikbudristek, 2020

Alokasi Belajar di tempat kerja dan Komunitas Praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa dengan persentase sebesar 70%. Belajar dari rekan dan guru lain sebesar 20%, kemudian pelatihan bersama fasilitator dan pendamping sebesar 10%. Selain itu, gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan utama Guru Penggerak adalah terwujudnya profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, modul pembelajaran yang disusun pun disesuaikan dengan hal tersebut.

Modul pertama memuat pembahasan mengenai paradigma dan visi dari Guru Penggerak. Jika guru telah memahami pondasi tersebut, akan dilanjutkan dengan modul kedua yang membahas mengenai praktik

Pembelajaran yang Berpihak pada Murid. Selanjutnya, modul ketiga membahas mengenai Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Setelah ketiga modul tersebut selesai dipelajari, guru akan melakukan refleksi dan memberikan dampak berkelanjutan. Sementara itu, asesmen dilaksanakan terhadap hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik dari rekan sejawat, pendamping, dan murid, serta peningkatan hasil belajar murid.

4. Kriteria Daerah Sasaran Program Guru Penggerak

Sejauh ini, belum semua daerah di Indonesia menjadi sasaran program Guru Penggerak. Beberapa daerah yang menjadi sasaran dari program ini antara lain: 1) Sumatera, 2) Jawa, 3) Bali, Nusa Tenggara, 4) Papua, Maluku, 5) Sulawesi, dan 6) Kalimantan. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan beberapa daerah tertentu saja yang menjadi sasaran dari program ini.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 5, Kemendikbudristek, 2020

Beberapa pertimbangan pemilihan keenam daerah itu antara lain: 1) daerah tersebut telah mewakili enam pulau besar di Indonesia, 2) bukan daerah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, 3) bukan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), karena pelatihan dilakukan secara daring, 4) dan merupakan daerah kebutuhan kepala sekolah sampai dengan tahun 2024.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 6: TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi merupakan episode keenam rangkaian Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan pendidikan tinggi agar bergerak lebih cepat sehingga Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia dan bersinergi dengan dunia kerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan SDM unggul yang memiliki kreatifitas dan daya saing global. Keduanya sangat penting karena tren global saat ini mengarah pada kemajuan pesat teknologi, pergeseran budaya, perubahan iklim dan perbedaan pada jenis dan masa kerja. Oleh karena itu, pendidikan tinggi perlu bergerak lebih cepat agar dapat bersaing di tingkat dunia.

Namun, pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara lain. Untuk dapat mencapai hasil mutu yang diinginkan tentu harus ada peningkatan pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Merdeka Belajar episode keenam merupakan salah satu terobosan pendanaan dalam kebijakan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek akan meningkatkan total anggaran yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebesar 70%. Adapun

komponen terbesar dalam peningkatan anggaran berdasarkan kinerja sesuai dengan misi diferensiasi masing-masing perguruan tinggi.

Terdapat tiga tujuan utama dalam peningkatan anggaran pendidikan tinggi, antara lain lulusan lebih mudah mendapat pekerjaan dan berpenghasilan layak, dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri, dan kurikulum lebih mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Ketiga tujuan tersebut perlu dicapai untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan dalam lingkup pendidikan tinggi. Untuk mendorong pencapaian perubahan tersebut, dilakukan juga penyederhanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi. Dari segi kualitas lulusan, IKU yang diukur adalah 1) lulusan mendapat pekerjaan yang layak, 2) mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus' dari segi kualitas dosen dan pengajar meliputi 3) dosen berkegiatan di luar kampus, 4) praktisi mengajar di dalam kampus, dan 5) hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional; dan dari segi kualitas kurikulum adalah 6) program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7) kelas yang berkolaborasi dan partisipatif, serta 8) program studi berstandar internasional.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 6, Kemendikbudristek, 2020

Dari 8 IKU pendidikan tinggi dapat menentukan arah perubahan ke depan sesuai dengan visi Merdeka Belajar. Di samping itu, perguruan tinggi juga akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk pendanaan atas keberhasilan pencapaian IKU. Bentuk pendanaan tersebut di antaranya meliputi insentif berdasarkan capaian IKU, *matching fund* untuk kerja sama dengan mitra, dan *competitive fund* program kompetisi Kampus Merdeka.

Jika sebelumnya pendanaan PTN hanya terdiri dari alokasi dasar dan dana afirmasi, saat ini terdapat pendanaan insentif yang diberikan berdasarkan capaian 8 IKU. PTN yang berhasil meningkatkan IKU atau mencapai target akan mendapatkan tambahan dana pada 2021 dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Alokasi dasar untuk PTN akan meningkat Rp800 miliar, di samping bonus Rp500 miliar bagi PTN yang berhasil meningkatkan capaian IKU terbanyak dan mencapai target yang ditetapkan Kemendikbudristek. Penggunaan bonus bergantung pada

bentuk hukum PTN, tapi setidaknya dapat digunakan untuk bonus kinerja SDM sebagai apresiasi atas pencapaian perubahan. Dalam pendanaan ini terdapat pengategorian PTN menjadi tiga liga yang kemudian diurutkan dengan sistem poin yang mengukur kenaikan capaian dan pencapaian target. Liga 1 terdiri dari PTN Badan Hukum, liga 2 terdiri dari PTN Badan Layanan Umum dan liga 3 terdiri dari PTN Satuan Kerja.

Bentuk pendanaan kedua adalah *matching fund* untuk kerja sama dengan mitra yang diberikan kepada PTN dan PTS. *Matching fund* diberikan untuk meningkatkan kerja sama perguruan tinggi dengan mitra industri dengan total alokasi dana sebesar Rp250 miliar. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan Kemendikbudristek dengan perbandingan 1:1 atau *one on one matching*. Guna memudahkan perguruan tinggi mencari mitra, Kemendikbudristek telah menyediakan *platform Kedaireka* sebagai tempat pertemuan calon mitra dan perguruan tinggi. Platform ini akan menjadi *marketplace* untuk menyalurkan solusi dari perguruan tinggi dan menyelesaikan masalah calon mitra.

Matching fund dapat diperoleh dengan mekanisme pengajuan proposal oleh calon mitra tentang permasalahan yang perlu dipecahkan, kemudian perguruan tinggi mengajukan solusi yang akan dikaji. Selanjutnya, mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama kepada Kemendikbudristek. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat

meyakinkan pemerintah bahwa proyek yang akan dikerjakan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 IKU pendidikan tinggi dan dapat memecahkan permasalahan mitra. Kemendikbudristek akan memberikan dana *matching fund* dengan sistem *first come first serve*. Melalui *matching fund*, kerja sama antara mitra dan perguruan tinggi dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbarui dan mahasiswa akan lebih siap memasuki dunia kerja.

Contoh kemitraan yang dapat menerima *matching fund* diantaranya berupa a) infrastruktur telekomunikasi 5G yang dirancang oleh pendidikan tinggi dan pembangunannya dikelola oleh mitra industri, b) mesin berbahan bakar biodiesel dan biogas sebagai inovasi pendidikan tinggi yang diproduksi secara massal oleh mitra industri, dan c) penelitian terkait pengelolaan limbah sawit untuk pakan ternak yang diterapkan oleh lembaga sosial untuk memberdayakan bisnis ternak di daerah. Setelah menemukan mitra yang tepat, perguruan tinggi dapat mengajukan proposal *matching fund* dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi 1) rasio pendanaan, dengan perbandingan 1:1 untuk topik umum dan 1:3 untuk topik khusus yang berupa isu sosial dan isu prioritas nasional, 2) jenis pendanaan, dapat berupa uang tunai dan *in-kinds* atau nilai kontribusi yang diukur secara akurat, dan 3) tipe perguruan tinggi, meliputi PTN dan PTS. Pendanaan *matching fund* akan diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian

8 IKU serta dikolaborasikan dengan tingkat partisipasi mahasiswa dan potensi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

Bentuk transformasi dana yang terakhir adalah *competitive fund* program kompetisi Kampus Merdeka untuk PTN dan PTS. Program ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi dari perguruan tinggi dan mendorong potensi pencapaian IKU. Pelaksanaan Merdeka Belajar tidak akan berjalan tanpa aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan. Setiap pimpinan perguruan tinggi perlu menentukan spesialisasi yang akan dikedepankan oleh institusinya agar *competitive fund* yang diberikan Kemendikbudristek dapat mencapai misi *diferensiasi*. Pencapaian misi tersebut nantinya akan bermuara pada pencapaian 8 IKU di setiap perguruan tinggi.

Beberapa contoh program yang dapat menerima *competitive fund* antara lain 1) program magang satu semester di perusahaan top dunia dengan pembimbing profesional, 2) inovasi penurunan emisi karbon di perkotaan yang merupakan hasil penelitian pendidikan tinggi, 3) kolaborasi prodi kesehatan dengan universitas top dunia yang melibatkan mahasiswa S2 dan S3, 4) program kemanusiaan satu semester yang berkolaborasi dengan organisasi sosial top dunia, serta 5) membangun program studi teknologi baru bersama perusahaan teknologi top dunia.

Competitive fund akan dikompertisikan sesuai dengan kategori masing-masing perguruan tinggi binaan untuk

memastikan aspek kompetisi dalam upaya untuk mendapatkan *competitive fund*. Skema pengkategorian perguruan tinggi terdiri dari tiga liga. Liga 1 terdiri dari PTN dan PTS Berdaya Saing dengan aspirasi menjadi perguruan tinggi berdaya saing global dengan lebih dari 18.000 mahasiswa aktif. Liga 2 terdiri dari PTN dan PTS Berkembang dengan aspirasi meningkatkan produktivitas dan relevansi lulusan dengan total mahasiswa aktif sebanyak 5.001 sampai 18.000. Sementara itu, Liga 3 terdiri dari PTN dan PTS Binaan dengan aspirasi meningkatkan tata kelola, sumber daya dan pembelajaran dengan 1.000 sampai 5.000 mahasiswa aktif. Kompetisi untuk mendapatkan *competitive fund* hanya terjadi dalam ruang lingkup masing-masing liga.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 6, Kemendikbudristek, 2020

Evaluasi bertahap yang dilakukan oleh tim dengan berbagai latar belakang terdiri dari 1) pengusulan proposal melalui laman Simbelmawa, 2) evaluasi administrasi yang dilakukan untuk memeriksa eligibilitas pengusul dan

pemenuhan persyaratan administrasi, 3) evaluasi dokumen proposal yang dilakukan secara independen oleh tiga anggota *reviewer* yang meliputi dua orang dari Direktorat Jenderal pendidikan tinggi (DIKTI) dan satu orang perwakilan Industri Dunia Kerja (IDUKA), 4) verifikasi kelayakan yang dilakukan melalui wawancara secara luring atau daring oleh tim *reviewer* untuk memastikan, menegaskan, dan memperjelas kelayakan program dalam mencapai 8 IKU, serta 5) penetapan pemenang yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Alokasi dana *competitive fund* sebesar Rp500 miliar diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya: 1) pencapaian 8 IKU dengan persentase 50%, 2) tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan dan 3) rekam jejak institusi dan/ atau mitra dalam program peningkatan akademik dan IKU dengan persentase masing-masing 25%. Hal penting yang perlu diketahui adalah tidak semua perguruan tinggi yang mengajukan *competitive fund* harus mempunyai mitra. Namun jika perguruan tinggi pendaftar memiliki mitra kelas dunia yang memiliki rekam jejak yang bagus, hal tersebut akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan pendanaan melalui program *competitive fund*. Ketentuan ini diberlakukan karena porsi kualitas bukan hanya didapatkan dari perguruan tinggi, tetapi juga mitra yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas yang diharapkan.

Program Merdeka Belajar episode keenam ini menjadi salah satu terobosan pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia guna mendorong perubahan-perubahan besar yang mendukung peningkatan daya saing global dan terciptanya ekosistem yang kompetitif dalam kolaborasi pendidikan tinggi dengan dunia industri. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra yang berasal dari beragam sektor di dunia untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 7: SEKOLAH PENGGERAK

Kualitas pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisis sumber daya manusia. Derasnya arus perkembangan zaman semakin menuntut kualitas pendidikan yang lebih baik guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan memprakarsai Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak adalah salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Adapun program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia melalui Profil Pelajar Pancasila. Cara paling mudah untuk menjelaskan visi reformasi pendidikan di Indonesia adalah profil Pelajar Pancasila yang mewakili harapan Kemendikbudristek setelah seorang peserta didik selesai menempuh pendidikannya. Dalam kata lain, transformasi sistem pendidikan di Indonesia mengarah ke perwujudan enam profil pelajar Pancasila.

Enam profil Pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, kemampuan bergotong-royong, berpikir kreatif, bernalar kritis, dan memiliki kemandirian.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7,
Kemendikbudristek, 2021

Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Namun, banyak sekolah yang belum melakukan transformasi pendidikan dengan paradigma tersebut dan hanya mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan tanpa berfokus pada luaran pendidikan itu sendiri. Kemendikbudristek melihat banyak sekolah di berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi pada hasil pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental. Transformasi tersebut diawali dengan sumber daya manusia sekolah yang unggul. Dalam hal ini, kemampuan guru dan kepala sekolah menjadi perhatian utama karena pada ujungnya semua transformasi pendidikan berawal dari kompetensi tenaga pendidik dan kepemimpinan kepala sekolah.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya



Program **kolaborasi** antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama



Intervensi dilakukan secara **holistik**, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah



Memiliki ruang lingkup yang mencakup **seluruh kondisi** sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta



Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri



Program dilakukan **terintegrasi dengan ekosistem** hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7,
Kemendikbudristek, 2021

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Terdapat beberapa perbedaan dari program transformasi sebelumnya. Pertama, pada dasarnya Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah. perbedaan selanjutnya adalah adanya intervensi secara holistik mulai dari sumber daya sekolah, proses pembelajaran, Ketiga, perencanaan dan pendampingan pemerintah daerah guna membentuk transformasi budaya sekolah. Disisi lain program ini mencakup seluruh kondisi sekolah yang ada di Indonesia tanpa memandang kriteria unggulan serta sekolah negeri maupun swasta.

Kemendikbudristek menyadari bahwa transformasi memerlukan proses yang cukup panjang, sehingga pendampingan yang melekat kepada sekolah akan dilakukan selama tiga tahun ajaran guna menciptakan sekolah yang bisa melakukan transformasi secara mandiri di kemudian

hari. Program Sekolah Penggerak dilakukan dan terintegrasi dengan ekosistem, sehingga pada akhirnya seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak .



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7,
Kemendikbudristek, 2021

Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri dan swasta di seluruh tahap selama tiga tahun hingga bergerak lebih maju sampai dua tahap dari sebelumnya selama tiga tahun. Kemendikbudristek menargetkan semua sekolah di Indonesia pada akhirnya akan mencapai tahap keempat, yakni tahap paling ideal. Pada tahap keempat, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik berada di atas rata-rata, terciptanya kondisi sekolah yang aman, inklusif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Selain itu, sekolah di tahap empat menerapkan perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi di samping adanya refleksi guru dan pembelajaran. Pada tahap keempat juga terdapat pengimbasan secara berkala oleh guru dan kepala sekolah.

Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran

	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4
	>=3 tingkat di bawah level yg diharapkan	1-2 tingkat dibawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Hasil Belajar	>=3 tingkat di bawah level yg diharapkan	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Berpusat pada murid
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan		Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
Refleksi diri dan pengimbasan			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

4 Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia 4

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7, Kemendikbudristek, 2021

Program Sekolah Penggerak memiliki lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan yakni penguatan SDM Sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan konsultatif dan asimetris.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7, Kemendikbudristek, 2021

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7,
Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sekolah Penggerak dengan mengacu pada kondisi daerah masing-masing, sehingga bentuk bantuan tidak akan sama di setiap sekolah.. Di sisi lain, Kemendikbudristek meyakini bahwa kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diubah, dimana Kemendikbudristek sebagai pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah dalam melakukan transformasi pendidikan

2. Penguatan sumber daya sekolah

2 Penguatan SDM sekolah
Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud

Pelatihan untuk KS, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru	Pendampingan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru	Implementasi Teknologi
<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru• Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, penilik <p><i>Dilakukan 1 kali/tahun selama program. Latihan nasional untuk perwakilan guru. Sementara guru lain dilatih oleh in-house training</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. <i>In-house training</i>2. Lokakarya tingkat Kabupaten/Kota3. Komunitas Belajar / Praktisi (Kelompok Mapel)4. Program Pendampingan / <i>Coaching</i><ol style="list-style-type: none">A. <i>1-on-1</i> dengan kepala sekolahB. Bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dgn guru <p><i>Dilakukan secara berkala 2-4 minggu sekali selama program</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Literasi Teknologi2. Platform Guru : Profil dan Pengembangan Kompetensi3. Platform Guru : Pembelajaran4. Platform Sumber Daya Sekolah5. Platform Rapor Pendidikan

1 pelatih ahli untuk 5-7 kepala sekolah. Pelatih ahli akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7, Kemendikbudristek, 2021

Kepala sekolah, pengawas sekolah, pemilik sekolah, dan guru akan diberikan pelatihan dan pendampingan intensif oleh pelatih ahli yang disediakan Kemendikbudristek. Pelatihan akan berfokus pada *clinical training* atau pelatihan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran atau lingkungan yang nyata sehingga efektifitasnya bisa teruji.

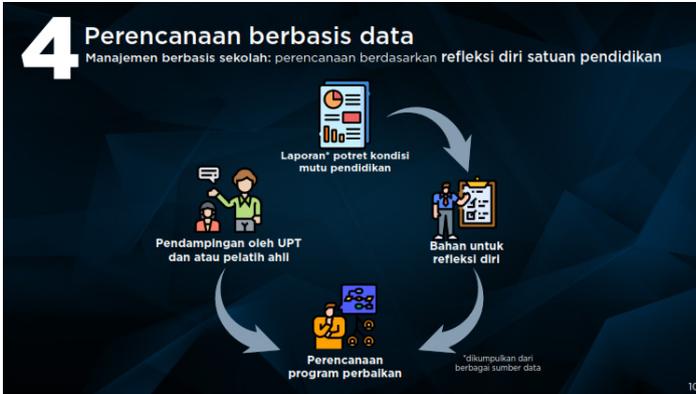
3. Pembelajaran dengan paradigma baru



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7, Kemendikbudristek, 2021

Pembelajaran yang bukan hanya berorientasi pada informasi, tetapi juga berorientasi pada penguatan kompetensi dan penanaman pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik melalui kegiatan di dalam kelas dan luar kelas. Kemendikbudristek menilai hal tersebut akan berdampak positif pada perkembangan kognitif peserta didik. Jika anak-anak punya identitas dan guru punya karakter dan moralitas yang baik, mereka akan mengalami pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan di lingkungan sekolahnya. Pembelajaran dengan paradigma baru memberikan fleksibilitas dan penyederhanaan kurikulum, kemerdekaan bagi para guru melakukan segmentasi di dalam kelasnya sehingga memudahkan pekerjaan mereka.

4. Perencanaan berbasis data



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7,
Kemendikbudristek, 2021

Layaknya seorang ilmuwan yang menggunakan strategi, guru juga merupakan seorang ilmuwan, sehingga dia harus melihat apakah strategi pembelajaran yang diterapkan berhasil atau tidak. Penggunaan data diperlukan sebagai bahan evaluasi. Ketersediaan data juga penting untuk menilai tingkat keberhasilan cara pengajaran guru di kelas dan perubahan yang dialami murid.

5. Digitalisasi sekolah



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7, Kemendikbudristek, 2021

Penyediaan infrastruktur akan menjadi prioritas Kemendikbudristek. Bukan hanya penyediaan laptop, proyektor, dan sebagainya, tetapi juga pengembangan platform dan aplikasi berorientasi pada siswa dan pembelajaran yang akan membantu serta mendukung guru dan sekolah.

Program Sekolah Penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kemendikbudristek menegaskan bahwa Program Sekolah Penggerak bukan ditujukan untuk sekolah unggulan, tetapi pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, kolaborasi dan inovasi menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Program ini ditargetkan bisa mengajak 2.500 di tahun pertama (2021), tahun kedua 10.000, tahun ketiga 20.000, dan tahun keempat 40.000, di tahun-tahun berikutnya mayoritas sampai

100 persen semua sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak yang langsung menysasar di 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota. Kemendikbudristek mengharapkan pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak sekolah yang berpartisipasi dalam program Sekolah Penggerak.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 8: SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN

Kemendikbudristek terus melakukan terobosan sebagai bentuk perbaikan yang berkesinambungan guna mentransformasi sistem dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar. Kemendikbudristek melanjutkan terobosan dengan meluncurkan Merdeka Belajar Episode 8: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan. Visi yang diusung adalah mewujudkan SMK unggul yang akan menjadi penggerak bagi sekolah lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa sehingga mampu mencapai standar industri.

Visi Program SMK Pusat Keunggulan

Menghasilkan lulusan yang teresap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta menjadi rujukan/pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

Lulusan SMK diproyeksikan siap untuk:

- Bekerja
- Melanjutkan Studi
- Wirausaha

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8,
Kemendikbudristek, 2021

SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi presiden Joko Widodo yang mengamanatkan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan

SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun Global. SMK Pusat Keunggulan adalah SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, sehingga terserap dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun mempersiapkan siswa menjadi wirausahawan muda. SMK Pusat Keunggulan berfungsi sebagai Pusat Keunggulan peningkatan kualitas kinerja dan rujukan bagi SMK lainnya.

SMK Pusat Keunggulan adalah program yang digawangi oleh Direktorat SMK Direktorat Jenderal Vokasi yang menerapkan filosofi lirik lagu Indonesia Raya yaitu “*Bangunlah jiwanya bangunlah badannya*”. Jiwanya dibangun, kemudian badannya turut dibangun. SDM yang memiliki *mindset* dan karakter yang siap untuk mengembangkan sampai ke infrastruktur dan sarana prasarana yang kontekstual. *Link and match* Kemendikbudristek laporkan pada tahun lalu program ini bernama SMK CEO atau *Centre of excellent* yang melibatkan 491 SMK di 2020 dari total 2043 SMK swasta dan negeri di tahun lalu. Yang mendaftar SMK *Centre of excellence* untuk tahun ini Kemendikbudristek kembangkan lebih jauh menjadi SMK Pusat Keunggulan. Konteks keunggulannya bukan berarti unggul sendiri atau eksklusif sendiri atau favorit sendirian tetapi justru maknanya adalah menciptakan SMK yang unggul bisa mengakselerasi atau melatih SMK yang lain untuk menjadi unggul juga.

Jadi SMK pusat unggulan menjadi akselerator SMK unggul se-indonesia tidak pada konteks eksklusivitas tapi justru menjadi SMK pelatih SMK yang lain.

Pertama yang harus Kemendikbudristek lakukan sebagai pemerintahan pembuat kebijakan dan program-program baru Kemendikbudristek harus jujur dengan tantangan yang Kemendikbudristek hadapi. SMK pada saat ini masih sulit menjawab kebutuhan di dunia kerja. Memang benar ada beberapa SMK yang memang sudah kelas dunia dan menghasilkan lulusan-lulusan yang langsung diserap di dunia pekerjaan bahkan yang menciptakan lapangan pekerjaan tapi kenyataannya bagi kebanyakan SMK di Indonesia belum mencapai level ini.

TANTANGAN

Saat ini, SMK masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja. Sehingga kondisi ini perlu dibenahi.

- Kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK sesuai kebutuhan dunia kerja masih sedikit**
- Belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar**
- Sinergi pemangku kepentingan, termasuk dunia kerja, pada program pengembangan SMK masih kurang**
- Manajemen sekolah masih cenderung terbebani hal-hal administratif.**
- Belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja**

Perlu ada solusi komprehensif untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8,
Kemendikbudristek, 2021

Beberapa tantangan Kemendikbudristek adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi daripada

orang-orang dewasa dalam SMK itu yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas ini masih sedikit. Mereka belum diberikan kesempatan yang cukup untuk mengupgrade kemampuan atau kompetensi mereka dan belum mendapatkan dukungan yang baik. Kedua adalah Sinergi antara berbagai macam pemangku kepentingan termasuk dan yang terpenting adalah dunia kerja. Perusahaan dan industri masih kurang sekali partisipasinya.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8, Kemendikbudristek, 2021

Ketiga adalah belum semua SMK mengembangkan kurikulumnya bersama dunia kerja kadang-kadang tidak relevan apa yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Belum semua SMK memiliki fasilitas sesuai standar walaupun dengan SDM yang baik atau lebih baik. Dengan kurikulum yang sudah lebih link tapi kalau fasilitas

tidak memadai sangat sulit melaksanakan pendidikan berkualitas dan relevansi untuk dunia industri. Dan terakhir adalah manajemen sekolah yang masih terbebani berbagai macam isu-isu administratif dan tidak berfokus kepada jiwa kewirausahaan. Kepala Sekolahnya sulit menemukan berbagai macam kolaborasi dengan dunia industri, jadi ini harus dikurangi jadi Kemendikbudristek perlu solusi yang tidak bisa satu jalan saja. Kemendikbudristek harus menemukan solusi yang komprehensif untuk menjawab semua tantangan yang ada. Secara serentak ini adalah tantangan yang harus Kemendikbudristek hadapi, dan Kemendikbudristek harus jujur dengan tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan terutama di SMK.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8, Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek memiliki falsafah bahwa “Kemendikbudristek terus memperbaiki tahun ke tahun dari apa yang Kemendikbudristek pelajari dari kesuksesan atau kegagalan di tahun berikutnya dari tahun sebelumnya”. Jadi ini adalah proses literasi yang Kemendikbudristek lakukan selama ini dari tahun 2019 Kemendikbudristek melakukan program namanya SMK revitalisasi. Fokusnya terutama hanya dengan meningkatkan mutu sarana prasarana. Ini adalah 2019, lalu Kemendikbudristek evaluasi 2019. Kemendikbudristek menyadari bahwa kunci daripada keberhasilan adalah SDM-nya juga bisa, hanya diberi mesin-mesin fasilitas prasarana baik. Jika SDM tidak bisa menggunakan alat-alat itu atau tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak diajarkan oleh industri dan pakar-pakar, berarti juga tidak bisa berhasil.

Tahun 2020 Kemendikbudristek meluncurkan SMK *center excellent*. *Batch* pertama terdapat 461 sekolah, Kemendikbudristek mulai mencoba kombinasi antara pelatihan SDM dan juga prasarana dimana Kemendikbudristek menunjukkan progres yang lebih cepat lagi. 4500 guru dan kepala sekolah masuk dalam program ini dan ini adalah peningkatan pelatihan buat Kepala Sekolahnya dan lain-lain tapi Kemendikbudristek juga mengevaluasi tahun 2019. Ini evolusi ketiga karena tahun 2020 Kemendikbudristek melakukan inkubasi menemukan apa yang berhasil apa yang tidak berhasil lalu Kemendikbudristek menyempurnakan lagi di SMK Pusat Keunggulan. Ada sarana prasarana dukungannya ada juga peningkatan SDM nya.

Dalam beberapa hal peningkatan SDM Kemendikbudristek tingkatkan tapi dua perubahan yang besar dari ini, yaitu dari pembinaan SMK Pusat Keunggulan. Dimana Kemendikbudristek akan menambahkan pembinaan dari pendidikan tinggi terutama dari produk verifikasi dan Politeknik yang paling hebat sebagai kakak besar. Sebagai kakak besar daripada SMK pusat unggulan ini. Kedua adalah walaupun SMK centracion cuma satu tahun jangka waktunya di SMK Pusat Keunggulan ini bisa di *extend* sampai dengan tiga tahun.

Tujuan Kemendikbudristek ada banyak sekali, ada berbagai macam kebingungan mengenai harusnya SMK tugasnya apa. Harusnya hasil atau Matrix kesuksesan SMK itu apa ? Kemendikbudristek disini ingin menjelaskan bahwa untuk SMK Pusat Keunggulan golnya atau bagaimana Kemendikbudristek bisa tahu bahwa ini sukses adalah langsung dari output yaitu lulusan. Ada tiga kriteria sukses kalau lulusannya langsung terserap di dunia kerja adalah satu Maps, yang pertama Matrix sukses pertama langsung bekerja diserap oleh industri, atau dua melanjutkan studi dia bisa ke politeknik atau ke Universitas untuk melanjutkan pendidikan dia, atau tiga dia menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja untuk dirinya sendiri yaitu menjadi wirausaha.

Tiga skenario ini akan dilihat sebagai sukses atau tidak sukses. Kalau lulusan SMK ini mengalami pengangguran dan bagi yang bekerja Kemendikbudristek juga sudah pasti akan memonitor, berapa penghasilan dia pada saat dia mulai bekerja

dan berapa peningkatannya di dalam beberapa tahun awal pertama. Karena seharusnya kalau Kemendikbudristek sudah menciptakan SMK Pusat Keunggulan harus ada value-nya. Kalau semua lulusan Kemendikbudristek dalam lima tahun dia bekerja hanya menerima Upah Minimum Regional (UMR) itu merupakan juga suatu indikasi dimana Kemendikbudristek harus meningkatkan kualitas Kemendikbudristek jadinya level kesejahteraan dan gaji yang diterima juga dimonitor oleh program ini. Harus di atas rata-rata itu yang namanya SMK Pusat Keunggulan dan kenapa Kemendikbudristek panggil ini Pusat Keunggulan, bukan agar ada SMK yang unggul saja.

Harapannya adalah pada saat SMK pusat unggulan ini level up dan mengupgrade dirinya, ujung-ujungnya tugas paling mulia dia adalah untuk membantu meningkatkan SMK lainnya di dalam bidang penyedia untuk mencapai level yang sama. Jadi dia pun akan menjadi katak besar untuk SMK lain karena jika tidak bisa sampai meningkatkan kualitas 14.000 SMK di seluruh Indonesia. Jangan lupa Ini bukan SMKN terbaik, biar dia sudah menjadi murid yang terbaik masukkan lulusan yang terbaik bukan alasannya Kemendikbudristek punya program SMK pusat unggulan adalah untuk mengupdate mereka. Merekalah nantinya akan menjadi SMK yang melatih SMK lainnya sehingga terjadilah *multiplier effect*.

Bentuk keselarasan yang ada ini bukan program MOU saja. Ini yang sangat penting karena banyak sekali yang Kemendikbudristek observasi program Kemendikbudristek

mulai nya pakai MOU, ada tanda tangan sama industri lalu habis. Itu tidak ada aktivitas lain, diversifikasi SMK Pusat Keunggulan ini sudah tidak ada lagi yang Kemendikbudristek maksudkan dengan kerjasama dengan dunia kerja. Ada delapan komitmen minimum yang Kemendikbudristek lihat. inilah Alasannya kenapa tidak mudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kalau tidak bisa memenuhi potensi untuk mencapai delapan ini lebih baik jangan mengikuti program SMK keunggulan. Inilah yang Kemendikbudristek butuhkan, Kemendikbudristek *link and match* ini 81 kurikulumnya harus dirancang oleh industri atau praktisi industri. Bukan hanya MOU saja tetapi kurikulumnya pun harus di oke kan dengan industri. Kedua pembelajaran harus berbasis proyek benar-benar Kerja Praktek yang harus *top skill* dan *hard skill* nya kuat. Ketiga peran jumlah daripada guru atau instruktur yang dari industri itu harus signifikan. Harus signifikan karena kalau guru-gurunya tidak berasal dari industri bagaimana dia mengajarkan. Keempat, silakan industri tempat praktek kerja minimal sekarang satu semester bagi para peserta didiknya. Satu semester magang di dalam industri sebagai keharusan. Ke-5 harus punya standard set dan sertifikasi kompetensi yang memadai. Ke-6 mengupdate teknologi dan pelatihan bagi guru secara rutin dari dunia kerja. Ini berkesinambungan guru yang bisa mengajar dengan baik adalah guru yang selalu belajar. Saya ulang lagi sama sekolah di sekolah non SMK pun sama guru yang bisa menjadi guru yang baik adalah guru yang senantiasa selalu meng-*upgrade*

pengetahuan dirinya. Tidak ada yang namanya guru mengajar dengan baik kalau gurunya tidak terus belajar. Ke-7 adalah riset terapan mendukung *teaching factory act* yang di berawal dari industri dan dilahirkan *downstream industry*. Harus buat apalagi yang menciptakan layanan service ataupun produk Manufacturing hasilnya memang dipasarkan. Kalau dia tidak bisa menciptakan produk-produk yang benar-benar atau layanan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat. Delapan adalah komitmen serapan, kalau ada kerjasama dengan industri harus ada komitmen serapan. Karena kalau tidak ada komitmen serapan itu namanya perusahaannya cuma setengah hati berkolaborasi dengan SMK tersebut. Tapi kalau ada komitmen serapan perusahaan itu akan memastikan bahwa apa yang dilakukan para peserta didik di SMK itu benar-benar mengikuti kebutuhan perusahaannya.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8, Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek memilih sektor-sektor prioritas keunggulan. Kemendikbudristek melihat tujuh sektor-sektor prioritas SMK yaitu pertama ekonomi kreatif ataupun hubungan dengan digital atau produk kreatif. Kedua pemesinan mesin dan konstruksi. Ketiga adalah hospitality, yaitu layanan service seperti perhotelan dan berbagai macam layanan yang hubungannya dengan hospitality. Keempat adalah dari sisi perawat ataupun mengurus dari berbagai macam sektor yang termasuk kategori Services. Kelima adalah maritim, dimana dunia Kemendikbudristek inilah negara kemaritiman. Keenam yaitu pertanian dan ketujuh sektor terbesar Kemendikbudristek yang sangat perlu dikembangkan tentunya kerjasama program dengan luar negeri. Ini kira-kira tujuh sektor yang menurut Kemendikbudristek kriterianya adalah pekerjaan-pekerjaan akan selalu dibutuhkan di Indonesia selama 30-40 tahun kedepan.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8, Kemendikbudristek, 2021

Mendukung *strategic Economic development* Indonesia, jadinya ini adalah sektor-sektor yang tidak mungkin kehabisan kerjaan. Ini sangat penting Kemendikbudristek memilih fokus kepada sektor yang benar-benar selaras dengan pertumbuhan ekonomi Kemendikbudristek. Ada enam jenis dukungan yang Kemendikbudristek layani untuk SMK Pusat Keunggulan yang terpilih yang pertama adalah penguatan SDM dengan pelatihan intensif kepala sekolah, pengawas sekolah dan para guru melalui pendampingan yang mewujudkan manajemen profesional. Kedua adalah pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Ini proses pembelajarannya harus berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kerja jadinya Kemendikbudristek memberikan fleksibilitas di dalam proses pembelajaran tapi juga dukungan pelatihan dalam bagaimana cara melakukannya yang *best practice*. Dilakukan ditempat-tempat lain ataupun di negara-negara lain. Ketiga adalah bantuan dana hibah yakni penguatan belajar praktek peserta didik dana hibah ini yang berfokus kepada alat sarana prasarana siswa yang berstandar dunia kerja. Harus memiliki alat-alat yang paling relevan di bidang manufakturing atau industri atau produk. Keempat adalah dukungan manajemen sekolah berbasis data. Bisa dibilang juga digitalisasi bahwa Kemendikbudristek menggunakan data agar mendukung manajemen sekolah menjadi lebih efisien. Kepala sekolah dan guru-guru bisa fokus kepada anak-anaknya bukan kepada beban administrasi. Kelima ini yang cukup spesial adalah pendampingan oleh pendidikan tinggi.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8,
Kemendikbudristek, 2021

Setelah menyeleksi beberapa perguruan pendidikan tinggi dengan program vokasi dan Politeknik yang terbaik di Indonesia untuk menjadi kakak-kakak tua atau kakak besar daripada SMK untuk mendampingi mereka menciptakan ekosistem yang lebih besar. Bayangkan banyak sekali SMK dengan skala yang lebih kecil sangat sulit melakukan kerjasama dengan industri tapi bagi universitas yang skalanya jauh lebih besar apalagi Universitas ternama yang punya berbagai macam kolaborasi dan riset. Kemampuan potensi untuk melakukan link and match yang lebih efektif ada di Universitas. jadi perlu dikerahkan tenaga universitas terbaik Kemendikbudristek untuk membina pendidikan tinggi dengan intensif.

Kemendikbudristek melihat peran mereka akan sama besarnya dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Karena mereka punya potensi menggalang industri lebih efektif dan juga punya kemampuan untuk mengarahkan dosen-dosen dan

mahasiswanya. Keenam adalah Sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk kerjasama. Kalau kerjasama ini tidak efektif antara pusat dan daerah tidak mungkin akan bisa sukses dan penyelenggaraan ini harus berkesinambungan dengan komitmen full dari Pemda dan pemerintah pusat.

PERGURUAN TINGGI YANG SIAP MENJADI PENDAMPING DALAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

No	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi
1	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	D.I. Yogyakarta
2	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Jawa Barat
3	Universitas Negeri Malang (UM)	Jawa Timur
4	Universitas Gadjah Mada (UGM)	D.I. Yogyakarta
5	Politeknik Negeri Bandung (Polban)	Jawa Barat
6	Universitas Telkom	Jawa Barat
7	Politeknik Negeri Batam	Kep. Riau
8	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	Jawa Timur
9	Universitas Sebelas Maret (UNS)	Jawa Tengah
10	Politeknik ATMI Solo	Jawa Tengah
11	dll	

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8,
Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek juga mencari dan mendorong kesinambungan pendidikan tinggi SMK jadinya pada saat sudah selesai dari SMK masih ada mentor yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitasnya. Selanjutnya adalah mewujudkan praktik kemitraan di dunia kerja dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi. Yang penting ekosistem ini menjadi lebih besar, lebih Mandiri dan lebih banyak kolaborasi. Contoh Politeknik-Politeknik ternama di Indonesia yang sudah baik ingin melakukan pendampingan kepada SMK pusat unggulan inilah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Politeknik

Negeri Batam, Politeknik Atmi Solo, Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Negeri Bengkalis. Ini adalah beberapa jagoan-jagoan Politeknik yang dengan semangat ingin membina dan menjadi mentor SMK Kemendikbudristek dan juga memberikan kesempatan bagi Universitas melakukan berbagai macam spesialisasi produk development di dalam SMK Pusat Keunggulan. Interaksi antara pendidikan tinggi dan SMK akan Kemendikbudristek cocokkan dan ini juga akan mendapat dampak positif lainnya seperti kelanjutan bekerja, kelanjutan pendidikan dari SMK ke tingkat Politeknik pun akan semakin terdukung dengan adanya kemitraan ini. Berikut Kemendikbudristek melihat contoh-contoh beberapa Universitas dengan program-program vokasi yang sangat baik seperti Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Padang, Universitas Telkom, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Malang.

JADILAH BAGIAN DARI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

PEMERINTAH DAERAH

Bersama Kemendikbud:

- Sosialisasikan Program SMK Pusat Keunggulan;
- ✓ Sukseskan pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan;
- ✓ Pantau dan evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan.

SEKOLAH

Bersama

- ✓ Daftar di: smk.kemdikbud.go.id/smkpk
- ✓ Bermitra dengan dunia kerja berkolaborasi membuat terobosan baru
- ✓ Menjadi SMK yang berkualitas dan berkinerja baik yang mampu membuat perubahan

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 8, Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek meminta pemerintah daerah untuk mensosialisasikan program SMK pusat unggulan dan sukseskan pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan karena ini akan menjadi kebanggaan daerah. Juga Untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ini di tingkat provinsi dan juga di kabupaten. Untuk sekolah yang ingin mendaftar di program ini melalui link website berikut:

smk.kemdikbud.go.id/mkpk

Kalau ingin bergabung dan untuk segera bermitra dengan dunia kerja dan berkolaborasi membuat terobosan baru. Para kepala sekolah dari SMK Kemendikbudristek harus berpikir cepat. Pendidikan mereka juga harus punya jiwa kewirausahaan yang besar karena ini membutuhkan dukungan yang otentik dari pada industri-industri. Dukungan dari sekolah untuk menjadikan SMK yang berkualitas dan berkinerja baik dan yang terutama keberanian untuk melakukan perubahan. Para pimpinan unit pendidikan jika tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru untuk mencoba hal yang mungkin gagal Kemendikbudristek tidak akan bisa sukses. Menciptakan inovasi apalagi dunia vokasi yang membutuhkan inovasi dengan cara cepat membutuhkan keberanian untuk kadang-kadang gagal, tapi untuk terus melakukan iterasi yang berbeda.

Di era kompetisi Global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa, sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang

sama-sama kuat. Pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat dan disinilah tugas Kemendikbudristek untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan-pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri. Agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan.

Terobosan inovatif link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek mulai dari pembelajaran program praktek kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK dan sebagainya, Kemendikbudristek tidak pernah berhenti melangkah SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin Siap bersinergi dengan pendidikan tinggi pendamping

yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul hebat dengan lulusan yang kompeten terampil dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8 plus yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagai praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK.

SMK Pusat Keunggulan benar ketahui bahwa Kemendikbudristek Pak nadiem Makarim sudah menunjukkan sejumlah program yang dijuluki dengan Merdeka Belajar. Kemendikbudristek melihat bahwa dengan kekayaan sumber daya alam Kemendikbudristek memberikan potensi untuk lapangan pekerjaan. Misalnya perkebunan, pertambangan, kemudian potensi-potensi kelautan yang sangat luar biasa, perikanan udang, rumput laut dan berbagai jenis hal ini memberikan kesempatan atau peluang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang berbasis sumber daya alam. Untuk bisa mengolahnya, memerlukan SDM sumber daya manusia dan sumber daya manusia ini memerlukan salah satunya keahlian, untuk itu di sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu upaya untuk membentuk dan mengisi. Menciptakan tenaga kerja yang betul-betul terlatih dan menguasai keahliannya. Revitalisasi vokasi SMK menjadi sangat penting.

Kemendikbudristek juga melihat bahwa kemajuan makin yang bergerak di bidang industri dan banyak sekali industri bisa dikembangkan di Indonesia baik yang berbasis sumber daya alam atau yang turunan-turunan. Misalnya *automobile industry* dibidang teknologi informasi dan industri di bidang pangan serta berbagai macam yang ada di Indonesia sangat luar biasa. Bandingkan yang ada di beberapa negara yang tandus tidak memiliki banyak sumber daya alam, penduduknya sedikit maka potensi market job Indonesia sedikit kedepan bahkan mulai muncul lapangan pekerjaan baru yaitu yang modern yang berbasis teknologi informasi. Kalau dulu 10 perusahaan terkaya di dunia itulah bergerak dibidang kesediaan *Exon* Katakanlah *Total British petroleum* sekarang justru yang berkembang menjadi perusahaan perusahaan terkait dunia bergerak dengan IT seperti Google dan Microsoft.

Ini memberikan kesempatan lapangan pekerjaan sendiri SDA, industri jasa modern, IT dan lain lain. Oleh karena itu peran sekolah menengah kejuruan jadi sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli yang khusus di bidangnya dan mulai mengisi lapangan pekerjaan. Tinggal bagaimana mencocokkan antara dimana permintaan dari job market lapangan kerja. Misalnya industri pabrik perusahaan dia memerlukan keahlian apa dicocokkan dengan sekolah kejuruan yang menyediakan siswa itu sehingga begitu lulus langsung diterima. Itulah niat baik daripada

Kemendikbudristek untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi sekolah menengah kejuruan sebagai Pusat Keunggulan. Ini perlu didukung oleh semua pihak termasuk oleh Pemda. Otomatis nanti kalau pemda-pemda juga jangan bekerja seperti biasa dan kemudian lulus bingung nyari pekerjaan. Arahkan sesuai dengan potensi di daerah masing-masing kalau potensi yang pertanian perkembangan buat sekolah menengah kejuruan bidang itu. Begitu keluar langsung terserap kedalam lapangan kerja.

Pendidikan dan Pelatihan vokasi dapat meningkatkan produktivitas nasional dan masalah ketenagaan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari masalah pendidikan terutama pendidikan dan pelatihan vokasi. Apa latar belakang pendidikan tenaga kerja Kemendikbudristek di Indonesia ini memang justru sebagian besar didominasi pendidikannya oleh non Diploma atau non Universitas kurang lebih sampai 80%. Oleh sebab itu menjadi hal yang sangat penting sebab menjadi hal yang sangat tinggi dalam rangka Kemendikbudristek meningkatkan daya saing. Kemendikbudristek meyakini dari pulau-pulau Indonesia mempunyai pertumbuhan yang berkualitas apabila sumber daya manusianya tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan itu sendiri. sebab Kemendikbudristek juga mengapresiasi banyak sekali kerja-kerja pemerintah dalam rangka mendorong vokasi ini terus berkembang. Diantaranya adalah insentif perpajakan 200% bagi perusahaan yang mengikuti program vokasi bersama-sama dengan pemerintah.

MERDEKA BELAJAR EPISODE 9: KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MERDEKA

Kemendikbudristek Republik Indonesia telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kesembilan yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka. Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan untuk seluruh pelajar di Nusantara yang hendak melanjutkan ke pendidikan tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Selain itu, para pelajar selepas melaksanakan pendidikan tingginya dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan status ekonomi keluarganya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah, yaitu dapat menjadikan SDM Indonesia yang unggul untuk memajukan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 9,
Kemendikbudristek, 2021

Program Bantuan Biaya Pendidikan Miskin dan Berprestasi atau Bidikmisi yang diluncurkan sejak tahun 2010 telah menunjukkan capaian yang sangat positif, ditandai dengan peningkatan jumlah penerima. Tercatat pada tahun 2010, penerima Bidikmisi hanya mencapai 18.185 orang, sedangkan pada 2021 jumlah penerima mencapai 200.000 orang, atau meningkat jumlahnya 10 kali lipat sebanyak 852.445. Namun demikian, pada tahun 2020 nama Bidikmisi berganti nama menjadi KIP Kuliah. Tujuan KIP Kuliah belum sepenuhnya tercapai karena terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bantuan biaya Pendidikan bagi penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah sejak tahun 2010 hingga 2020 hanya sebesar Rp2.400.000 per semester untuk semua prodi. Padahal, besaran biaya SPP/UKT di masing-masing perguruan tinggi sangat tergantung pada kualitas Prodi dan perguruan tinggi, bahkan ada yang bisa mencapai 15.000.000 per semester.
2. Perguruan tinggi cenderung menolak calon mahasiswa penerima KIP Kuliah pada untuk masuk di prodi dengan SPP/UKT lebih tinggi dari Rp2.400.000. Sebagai konsekuensinya, calon mahasiswa kurang mampu tidak dapat mengakses Prodi-Prodi terbaik pada pendidikan tinggi terbaik.
3. Bantuan biaya hidup penerima bantuan Bidikmisi tahun 2010 sampai 2016 hanya Rp600.000. Kemudian ada

peningkatan sebanyak dua kali, yakni pada 2017 menjadi Rp650.000 per semester dan pada 2019 menjadi Rp700.000 per semester. Jumlah biaya hidup tersebut tidak mencukupi untuk banyak daerah, terutama di kota-kota besar.

4. Calon mahasiswa tidak berani memilih prodi dan perguruan tinggi terbaik di kota dan pulau lain, cenderung memilih perguruan tinggi yang dekat dengan tempat tinggal untuk mengurangi pengeluaran biaya hidup.

Berdasarkan kondisi yang ada, Kemendikbudristek berkomitmen memajukan pendidikan di Indonesia secara merata. KIP Kuliah menjadi kebijakan tidak hanya mewujudkan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan mobilitas sosial sehingga anak yang berprestasi tapi kurang mampu bisa mencapai mimpi setinggi-tingginya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek meningkatkan besaran bantuan biaya pendidikan atau uang kuliah dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. KIP Kuliah pun diharapkan semakin memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Khusus bagi mahasiswa baru penerima KIP Kuliah Tahun Akademik 2021/2022, bisa mendapatkan bantuan biaya uang kuliah maksimal Rp12 juta untuk satu semesternya.

Kemendikbudristek mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP

Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020, menjadi sebesar Rp2,5 triliun.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 9, Kemendikbudristek, 2021

KIP Kuliah akan diberikan kepada 200 ribu mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Kemendikbudristek. Adapun biaya pendidikan akan disesuaikan dengan prodi masing-masing. Untuk Prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka akan mendapatkan maksimal Rp12 juta. Kemudian, prodi berakreditasi B mendapatkan maksimal Rp4 juta. Dan prodi berakreditasi C mendapatkan maksimal Rp2,4 juta.

Kemudian, berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini ditentukan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

tahun 2019. Besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar Rp800.000, klaster kedua sebesar Rp950.000, klaster ketiga sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp. 1,4 juta.

1. Dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, KIP Kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Sehingga terwujud apa yang pemerintah dan masyarakat harapkan, diantaranya:
2. Calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih Prodi unggulan pada pendidikan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di seluruh Indonesia.
3. Orang tua lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.
4. pendidikan tinggi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa agar masuk di Prodi terbaik.
5. Kualitas SDM meningkat dengan memastikan calon mahasiswa yang memiliki potensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di Prodi unggulan.

Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka

The infographic is titled 'Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka' and features the logo of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). It contains the following text:

Bagi calon mahasiswa yang kurang mampu, tetapi memiliki ambisi besar: Manfaatkanlah program KIP Kuliah Merdeka ini untuk meraih masa depan.

Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui:

- Jalur seleksi UTBK-SBMPTN.
- Seleksi Mandiri PTN bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN, Anda masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN.
- Ataupun melalui seleksi masuk PTS, bagi siswa kurang mampu yang berminat masuk ke PTS, Anda dapat mendaftar KIP Kuliah kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sistem KIP Kuliah di kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Mohon perhatikan batas waktu untuk setiap jenis seleksi.

Batas Waktu:

- 1 April 2021
- Agustus – Oktober 2021 (bergantung kepada jadwal seleksi mandiri setiap PTN)
- Oktober 2021 (bergantung kepada jadwal seleksi masuk setiap PTS)

09

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 9, Kemendikbudristek, 2021

Kemendikbudristek mengajak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan KIP Kuliah Merdeka yang disediakan pemerintah. Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Sementara itu, bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN, tergantung jadwal seleksi mandiri di setiap PTN. Ataupun, dapat melalui seleksi masuk PTS, kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai. Informasi dan pendaftaran KIP Kuliah bagi calon mahasiswa baru dapat ditemukan pada kip-kuliah.kemdikbudristek.go.id



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 9, Kemendikbudristek, 2021

Program KIP Kuliah sangat strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pada pendidikan tinggi. KIP Kuliah menjadi instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita generasi muda bangsa. Kepada para pimpinan pendidikan tinggi, Kemendikbudristek mengimbau agar pendidikan tinggi memperbanyak sosialisasi kepada siswa-siswa kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar pada pendidikan tinggi dan Program Studi unggulan di Universitas terbaik. Dengan KIP Kuliah, Tercapainya SDM Unggul, Indonesia Maju!

MERDEKA BELAJAR EPISODE 10: PERLUASAN PROGRAM BEASISWA LPDP

Program Merdeka Belajar episode ke-10 adalah perluasan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Keberadaan LPDP sebagai lembaga pengelola dana pendidikan telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Kabar baiknya, LPDP akan melakukan perluasan program yang merangkul lebih banyak lagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan serta pelaku budaya untuk bisa meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kemendikbudristek merancang sejumlah program di bawah kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama dalam hal pengembangan keterampilan secara akademis dan praktis.

Berjalannya pendidikan di Indonesia tersebut difasilitasi oleh anggaran belanja pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana pendidikan tidak hanya mencakup ranah tingkat pendidikan tinggi saja, tetapi juga penelitian dan budaya. Oleh sebab itu, Dewan Penyantun membuat kebijakan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Peningkatan belanja pendidikan meningkat luar biasa sejak awal 2009 sampai sekarang. Pada 2021, total belanja negara untuk bidang pendidikan mencapai 1,550 triliun.

Kondisi pandemi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan angka total belanja pendidikan, yaitu lima kali lipat dari sebelumnya. Salah satu alokasi anggaran belanja adalah pemberian bantuan kuota data internet bagi murid, guru, mahasiswa, dan dosen di satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek maupun satuan pendidikan berbasis agama di bawah Kementerian Agama. Dana abadi pendidikan digunakan untuk membiayai beragam jenis beasiswa, mulai dari reguler, afirmasi, Pra-Sejahtera, maupun ASN dan TNI-Polri. Harapannya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama benar-benar serius memikirkan rancangan penggunaan dana abadi tersebut.

Sejauh ini, LPDP telah mengalokasikan dana abadi sebesar Rp70,1 triliun. Hal tersebut selaras dengan program Merdeka Belajar episode ke-10, yaitu perluasan program beasiswa LPDP. Kemendikbudristek mengekspansi program-program dukungan beasiswa dosen, guru, terutama guru SMK. LPDP akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelajar dan mewujudkan tata kelola yang baik serta akuntabilitas yang jelas. Perluasan program LPDP diharapkan akan menghasilkan dampak perbaikan dan penguatan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Masyarakat dunia hari ini menghadapi tantangan yang besar dalam era disruptif, termasuk cepatnya arus informasi

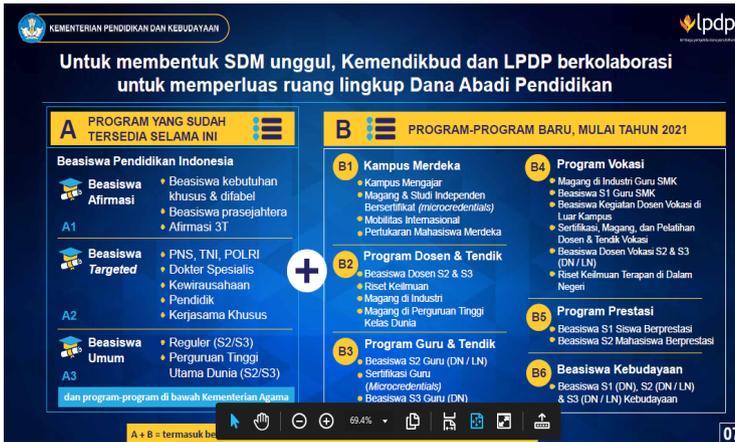
dan teknologi yang menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek. Dilihat dari sisi sosiokultural, terdapat perubahan pada aspek budaya dan bekerja yang berdampak pada SDM Indonesia. Perubahan yang cepat ini direspons dengan cepat melalui inovasi Kemendikbudristek dan LPDP. Program Merdeka Belajar yang diinisiasi Kemendikbudristek bertujuan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan transformasi pendidikan.. Program LPDP juga berevolusi sehingga sesuai dengan upaya meraih profil Pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.

Inklusivitas dan fleksibilitas menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan hari ini. Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kesenjangan kualitas pendidikan di daerah, sehingga program Merdeka Belajar dirancang untuk dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak di daerah untuk belajar di jenjang pendidikan tinggi. Penggunaan dana abadi yang dikelola LPDP juga difokuskan pada peningkatan kompetensi dan wawasan kebinekaan pendidik dan pelaku budaya. Selain itu, internalisasi nilai dari profil Pelajar Pancasila tidak hanya dilakukan terhadap peserta didik, tetapi juga pendidik. Kemendikbudristek menyadari bahwa populasi masyarakat Indonesia tergolong sangat besar sehingga dibutuhkan upaya yang keras dan gerak yang cepat untuk membawa negara ini mampu bersaing di tingkat dunia.

Sebelum pandemi COVID-19, LPDP sebagai lembaga yang memberikan dana bantuan pendidikan secara rutin membuka pendaftaran sebanyak dua kali dalam setahun. Adapun rata-rata pelamar beasiswa mencapai belasan ribu dari seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun 2020, LPDP hanya membuka program beasiswa secara terbatas di tengah situasi pandemi. Kemudian, pada 2021 LPDP secara resmi bekerjasama dengan Kemendikbudristek untuk memperluas program beasiswa pendidikan. Kabar ini tentu merupakan angin segar yang harus disambut dengan baik. Salah satu inovasi Kemendikbudristek dalam mewujudkan perubahan pada sistem pendidikan adalah melalui transformasi jenis program beasiswa yang tidak hanya tersedia bagi pelajar, tetapi juga kalangan pendidik.

Jenis program beasiswa yang disediakan oleh LPDP meliputi beasiswa afirmasi sebelumnya yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan pelajar dari daerah 3T, beasiswa *targeted group* yang diberikan untuk beberapa sektor penting seperti dokter spesialis, TNI, Polri dan PNS, serta beasiswa umum untuk menempuh jenjang S2 dan S3. Melalui kerja sama dengan Kemendikbudristek, dikembangkan enam program beasiswa baru. LPDP dan Kemendikbudristek membuka kesempatan kepada kalangan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan tinggi. Program LPDP diharapkan mampu meningkatkan inklusivitas dan akses masyarakat terhadap

pendidikan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan Merdeka Belajar. Berikut gambaran umum program beasiswa yang telah dilaksanakan dan program baru yang ditambahkan.



Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 10, Kemendikbudristek, 2021

Berdasarkan data di atas, keenam program baru yang dicanangkan LPDP dan Kemendikbudristek dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat, tidak hanya sekedar peserta didik saja tetapi juga guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Pengelompokan jenis program beasiswa B1 sampai B6 juga mempermudah calon pendaftar untuk mengetahui jenis program yang paling sesuai. Selain itu, kebijakan baru terkait perluasan program beasiswa LPDP juga bertujuan untuk menyederhanakan proses seleksi yang selama ini dilakukan secara berlapis. Berkaitan dengan hal tersebut, LPDP berusaha membuat kebijakan baru untuk mempermudah segala proses yang ada, seperti penerima manfaat beasiswa dapat menjalankan pendidikan

bergelar S1, S2, S3 dan program non gelar yang berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang ketat, dilakukan seperti pengelompokan daftar universitas secara sistematis, mempermudah para pendaftar yang sudah memiliki LoA, serta membantu pendaftar yang belum memiliki LoA. Berikut merupakan perbedaan kebijakan yang diberlakukan dengan kebijakan baru yang akan berlaku.

A Kebijakan program beasiswa LPDP yang sudah tersedia selama ini dirancang ulang agar proses seleksi menjadi lebih sederhana

Kebijakan saat ini

- Beasiswa kebanyakan diberikan untuk mahasiswa program S2 dan S3
- Daftar universitas tujuan dikompilasi dari ranking dunia dan masukan berbagai pihak
- Calon penerima beasiswa harus melalui seleksi yang berlapis (termasuk wawancara)

Arah kebijakan baru

- Penerima manfaat beasiswa dapat menjalankan pendidikan bergelar S1, S2, S3, dan program non-gelar yang berkualitas tinggi (berdasarkan kriteria yang ketat)
- Daftar universitas tujuan dibuat secara sistematis.
 - Agregasi dari 3 ranking terbaik dunia (QS, Times Higher, ARWU/Shanghai Ranking)
 - Universitas terbaik (top 5-10) di negara terpilih
 - Program studi terbaik per topik (*by subject*)
- Pendaftar dengan LoA¹ (sudah diterima di kampus tujuan) akan dipermudah prosesnya
- Pendaftar yang belum punya LoA akan dibantu proses pendaftarannya

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 10, Kemendikbudristek, 2021

Selanjutnya, LPDP juga mendukung program Merdeka Belajar. Secara umum, terdapat empat program unggulan Kampus Merdeka yang didukung oleh LPDP di tahun 2021, antara lain:

1. Kampus Mengajar
2. *Micro credentials*, yaitu program magang dan studi independent bersertifikat
3. Mobilitas Internasional Mahasiswa
4. Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Melalui program Merdeka Belajar, LPDP akan memberikan beasiswa non-gelar kepada peserta program Kampus Merdeka. Hal tersebut tentu harus kita sambut dengan baik. Mahasiswa dapat menjadi asisten guru di daerah 3T, mengikuti magang, atau bertukar tempat dengan mahasiswa lain di dalam maupun luar negeri dengan transfer kredit sebesar 20 SKS.

Mahasiswa dapat berkontribusi mendampingi anak-anak di daerah 3T melalui program Kampus Mengajar. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menjawab dan menyelesaikan masalah ketimpangan atau kesenjangan di Indonesia, khususnya ditunjukkan dengan daerah-daerah yang tingkat literasinya masih rendah. Antusiasme mahasiswa juga tampak tinggi dilihat dari jumlah relawan yang tergabung, yaitu sekitar 15.000 sampai 35.000.

Program Kampus Merdeka juga membuka akses bagi peserta didik atau mahasiswa untuk melakukan magang di industri kelas dunia dengan didampingi oleh mentor profesional. Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti pelatihan intensif secara daring maupun luring dengan dukungan biaya oleh LPDP dan sertifikasi dari Kemendikbudristek. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan mengikuti pertukaran pelajar di kampus-kampus unggulan di dalam maupun luar negeri.

Tidak berhenti di situ, program beasiswa kebudayaan juga diberikan khusus kepada para seniman dan pelaku

budaya baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung misi kebudayaan Kemendikbudristek yang membuat masyarakat lebih menghargai keindahan adat budaya dan kreativitas di dalam negeri.

Tahun ini, LPDP akan berfokus memberikan pembiayaan untuk dosen dan guru. Program untuk dosen meliputi

1. Beasiswa regular untuk gelar S2 dan S3.
2. Magang di industri di perusahaan kelas dunia selama lebih dari satu semester.
3. Subsidi riset keilmuan.
4. Magang di perguruan tinggi berkelas dunia lain dengan dukungan berupa subsidi dan dukungan mobilitas selama satu sampai enam bulan.

Di samping itu, program beasiswa guru meliputi dukungan studi S2 dan S3 di dalam dan luar negeri dan sertifikasi. Beasiswa untuk pengajar vokasi memberikan dukungan kepada guru SMK untuk magang di industri dan melanjutkan studi beasiswa S1, serta kegiatan sistem vokasi di luar kampus bagi dosen perguruan tinggi vokasi. Mereka juga dapat melakukan sertifikasi, magang, pelatihan dosen dan tendik vokasi, beasiswa pascasarjana di kampus dalam dan luar negeri bagi dosen, serta riset keilmuan terapan di dalam negeri.

LPDP juga membuka kesempatan kepada lulusan SMA dan sederajat yang berprestasi untuk mendapatkan

beasiswa jenjang S1 baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, beasiswa S2 juga terbuka luas untuk mahasiswa yang memiliki prestasi di bidangnya. Berikut adalah detail profil masing-masing program, mulai dari B2 sampai B6.

B2. Program Dosen dan Tenaga Kependidikan


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


B2

 Program-program untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan





Beasiswa Dosen Reguler S2 & S3

Beasiswa penuh bagi dosen akademik untuk meraih gelar magister atau doktoral baik di dalam maupun luar negeri



Riset Keilmuan

Subsidi untuk dosen PT akademik menjalankan riset-riset keilmuan



Magang di Industri

Subsidi bagi dosen perguruan tinggi akademik untuk magang (*sabbatical* atau bekerja *part-time*) di perusahaan kelas dunia selama 1 semester atau lebih



Magang di Perguruan Tinggi

Subsidi bagi dosen perguruan tinggi akademik untuk bekerja (mengajar atau meneliti) di perguruan tinggi kelas dunia, termasuk mobilitas 1-6 bulan

17

B3. Program Guru dan Tenaga Kependidikan


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


B3

 Program-program untuk Guru dan Tenaga Kependidikan





Beasiswa S2 Guru (Dalam Negeri & Luar Negeri)

Beasiswa S2 untuk guru sekolah negeri dan swasta yang sudah memiliki L₀A S2 di perguruan tinggi kelas dunia



Sertifikasi Guru (Microcredentials)

Subsidi biaya program sertifikasi atau *microcredentials* untuk guru dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA



Beasiswa S3 Guru (Dalam Negeri)

Beasiswa S3 untuk guru kepala sekolah dan pengawas di 8 perguruan tinggi terpilih dalam negeri

18

110

Merdeka Belajar Episode 1-10
Kemendikbudristek

B4. Program Vokasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

B4 Program-program untuk Vokasi (1/2)



- Magang di Industri untuk Guru SMK**
Subsidi gaji dan biaya hidup untuk guru SMK dapat pengalaman kerja di perusahaan berkualitas tinggi
- Beasiswa S1 untuk Guru SMK**
Subsidi biaya pendidikan S1 untuk calon-calon guru SMK
- Beasiswa Kegiatan Dosen Vokasi di Luar Kampus**
Subsidi untuk dosen vokasi magang di industri (*sabbatical* atau *part-time*) atau bekerja di perguruan tinggi (mengajar atau meneliti) lain selama 1 semester atau lebih

19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

B4 Program-program untuk Vokasi (2/2)



- Sertifikasi, Magang, dan Pelatihan Dosen & Tendik Vokasi**
Subsidi untuk program sertifikasi, magang bersertifikat, atau program pelatihan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi vokasi
- Beasiswa Dosen Vokasi S2 & S3 (Dalam Negeri & Luar Negeri)**
Beasiswa penuh S2 & S3 untuk dosen dan perguruan tinggi vokasi
- Riset Keilmuan Terapan di Dalam Negeri**
Subsidi untuk perguruan tinggi vokasi dan dosen-dosen vokasi menjalankan riset-riset keilmuan terapan

20

B5. Program Siswa SMA dan Mahasiswa Berprestasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

lpdp

B5 Program-program untuk siswa SMA dan Mahasiswa Berprestasi



Beasiswa S1 Siswa SMA Berprestasi (Dalam Negeri & Luar Negeri)

- Beasiswa S1 penuh untuk siswa SMA yang berprestasi, contoh: pemenang olimpiade akademik, juara olahraga internasional, dll
- Siswa SMA (jalur non-prestasi) yang berhasil diterima di program sarjana perguruan tinggi Top 15 Dunia (Harvard, Oxford, dll)

Beasiswa S2 Mahasiswa Berprestasi (Dalam Negeri & Luar Negeri)

Beasiswa S2 penuh untuk mahasiswa S1 berprestasi (misalnya, pemenang kompetisi tingkat internasional)

21

B6. Program Beasiswa Kebudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

lpdp

B6 Program beasiswa kebudayaan



Beasiswa S1 Kebudayaan (Dalam Negeri)

Beasiswa penuh khusus untuk Program Studi S1 Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Beasiswa S2 Kebudayaan (Dalam Negeri & Luar Negeri)

Beasiswa S2 khusus untuk petaku budaya

Beasiswa S3 Kebudayaan (Dalam Negeri & Luar Negeri)

Beasiswa S3 khusus untuk petaku budaya

Catatan: menggunakan Dana Abadi Pendidikan

22

Melalui perluasan program beasiswa, peluang masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin terbuka lebar. LPDP dan program Merdeka Belajar saling tersinkronisasi menjadi satu kesatuan dalam hal kebijakan dan *output* yang dihasilkan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu upaya mencapai tujuan pendidikan yang menyejahterakan semua rakyat Indonesia. .

Merdeka Belajar

Episode 1-10
Kemendikbudristek

Indonesia berdiri di atas semangat dan cita-cita kemerdekaan yang di-
gaungkan oleh para tokoh pendiri bangsa dan diperjuangkan oleh rakyat.
Salah satu dari tokoh pendiri bangsa tersebut adalah Ki Hajar Dewantara
yang telah mencetuskan konsep kemerdekaan dalam belajar dengan
pendekatan humanis.

Pemikiran tersebut menginspirasi kami di Kementerian Pendidikan, Ke-
budayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam merancang
kebijakan transformatif yang akan secara langsung membawa sistem pen-
didikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut pun pada
gilirannya kami beri nama "Merdeka Belajar".

Paradigma Merdeka Belajar adalah pelibatan beragam pihak, mulai dari
institusi pendidikan, guru, keluarga, dunia usaha, dan dunia industri, serta
masyarakat untuk mewujudkan Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Nadiem Anwar Makarim
*Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi*



ISBN 978-623-6613-31-3

